



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Kyai Brengkel No. 13/15 Purworejo 54112**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Cover	i
Daftar isi	ii
Petikan Keputusan Bupati Purworejo	iv
Keputusan kepala dinas	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	15
2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
5.1. Program dan Kegiatan	60
5.2. Pendanaan Indikatif	61

BAB VI	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	67
6.1.	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	67
6.2.	Ilustrasi hubungan antara tujuan sasaran RPJMD dengan indikator program dan kegiatan	68
BAB VII :	PENUTUP	69

LAMPIRAN :

- I. Rekapitulasi Pendanaan
- II. Definisi operasional indikator kinerja sasaran
- III. Definisi operasional indikator kinerja program
- IV. Visi Misi Bupati Purworejo 2017-2021



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. KyaiBregkel No. 13/15 PurworejoKode Pos 54112

Telp. (0275) 321070 Fax. (0275) 325451

E- mail: dinperinaker@purworejokab.go.id Website: dinperinaker.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 050.12/694/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 – 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Merumuskan Rancangan Renstra
 2. Menyajikan Rancangan Renstra
 3. Menyusun Rancangan Akhir Renstra
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 6 April 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO,

Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
19630906 198603 1 018

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR:050.12/694/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN TENAGAKERJA KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2017 – 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS DINAS PEINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 – 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Sutrisno, M.Si 19630906 198603 1 018	Kepala Dinas	Penanggung Jawab merangkap Ketua
2.	Pracoyo, S.Sos 19611008 198403 1 101	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Drs. Aris Widyantoro,MM 19600708 199203 1 005	Kepala Bidang Pentatrans	Anggota
4.	Ir. Subagiyo, M.Si 19600514 198903 1 009	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
5.	Lilik Setiawan,SE 19700109 199803 1 004	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Bambang Darmuko, S.Sos. MT 19620929 198110 1 001	Kepala UPT LLK	Anggota
6.	A. Roni Krisnanto, A.Md 19830206 201001 1 0019	Pelaksana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Faizah Isnaeni, S.Pd --	Pelaksana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Purworejo
 pada tanggal : 6 April 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
 KERJA KABUPATEN PURWOREJO,

Drs. SUTRINO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 19630906 198603 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.034,82 km^2 dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 710.435 jiwa (data BPS) tersebar di 16 Kecamatan dan 494 Desa/ Kelurahan. Dari luas wilayah yang ada, sepertiganya merupakan dataran tinggi yang terletak dibagian utara. Dua per tiga wilayah merupakan dataran rendah terletak disisi selatan. Mayoritas penduduk menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian karena luas lahan pertanian mencapai 84,18% dari luas wilayah.

Karakteristik alam Purworejo sebagai wilayah pertanian dan sumber daya manusia yang relative hidup dari hasil pertanian dalam arti luas, masih sangat relevan jika pembangunan lima tahun mendatang masih menitikberatkan disektor pertanian. Slogan “Go..... Agriculture” masih layak dipertahankan selama lima tahun mendatang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan secara periodik. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun yang diimplementasikan pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara tahunan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian urusan dan kewenangan bagi pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Pusat ditata kembali. Undang-undang ini banyak mengatur beberapa urusan pemerintah Daerah ditarik menjadi Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang menyerahkan urusan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini kewenangan Pemerintah Kabupaten berkurang cukup signifikan. Pembagian urusan juga mengalami perubahan. Ketenagakerjaan menjadi urusan wajib, Perindustrian dan Transmigrasi menjadi urusan pilihan. Urusan Pengawasan Ketenagakerjaan yang semula menjadi kewenangan Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi.

Rencana Strategis (Renstra) 2016–2021 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021, Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian masih banyak mengetengahkan isu-isu strategis. Urusan Ketenagakerjaan masih sangat relevan mengangkat topik pengangguran dengan indikator jumlah penempatan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja. Urusan Perindustrian masih harus bekerja keras dalam mengangkat Industri kecil menengah agar mampu bersaing di pasar regional maupun ekspor. Urusan ketransmigrasian mengetengahkan topik animo masyarakat bertransmigrasi, sedangkan kuota transmigran relative sangat kecil. Pada sisi lain, kewenangan transmigrasi keluar daerah kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahapan, pada garis besarnya terbagi dalam 4 tahapan berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra PD;
2. Penyusunan rancangan Renstra PD;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan

4. Penetapan Renstra PD.

Tahapan pertama adalah persiapan penyusunan renstra, yaitu pembentukan tim, orientasi tentang renstra, menyusun agenda kerja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan kedua adalah penyusunan rancangan renstra, yaitu perumusan dan menyajikan rancangan renstra melalui beberapa tahapan seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, review renstra kementerian dan Renstra provinsi, penelaahan RTRW, perumusan isu-isu strategis, telaah Visi Misi Bupati, perumusan tujuan sasaran. Mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra, perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, termasuk lokasi kegiatan, perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Rumusan renstra tersebut disajikan secara sistematis sebagaimana akan dibahas pada sistematika penulisan.

Tahapan ketiga adalah penyusunan rancangan akhir yaitu penyempurnaan rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tahapan keempat adalah penetapan renstra, yaitu rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir oleh Bappeda guna menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya, diajukan oleh Bappeda kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.

Secara garis besar Pembagian tugas dan fungsi dalam Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Purworejo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan renstra mengacu pada landasan hukum di atasnya, seperti landasan hukum penyusunan RPJMD, RKJP, ditingkat kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 65);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra 2016 – 2021 adalah mengimplementasikan Visi Misi Bupati 2016 – 2021. Renstra merupakan rencana strategis, pedoman dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan urusan tenaga kerja, urusan perindustrian dan urusan transmigrasi.

Maksud penyusunan Renstra :

1. Memberi gambaran tentang kondisi dinas dalam kurun waktu lima tahun yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Sebagai acuan yang terarah bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.
3. Sebagai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra :

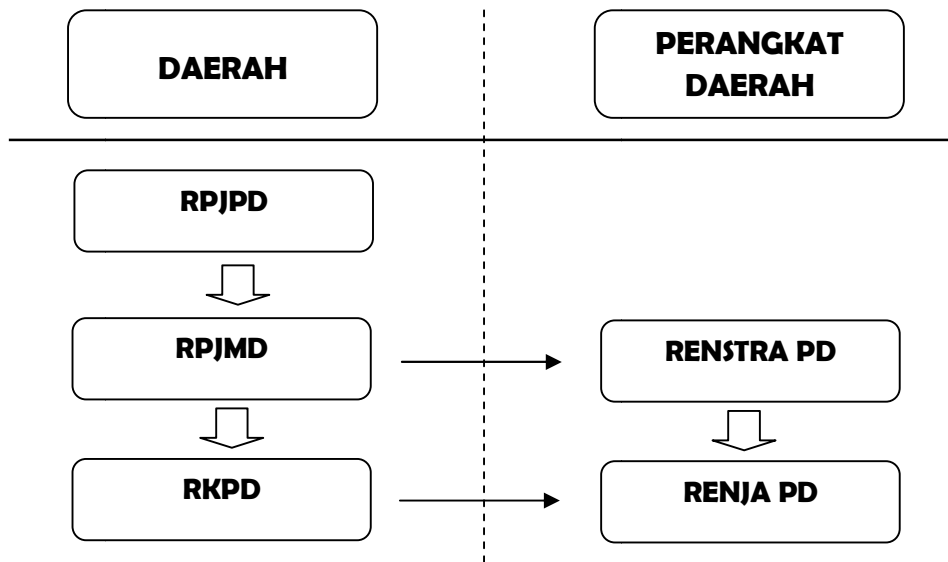
1. Mengimplementasikan visi misi Bupati Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dinas
2. Memberikan landasan dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
3. Sebagai instrument evaluasi, pengendalian, pengawasan kegiatan Perangkat Daerah

1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Lainnya

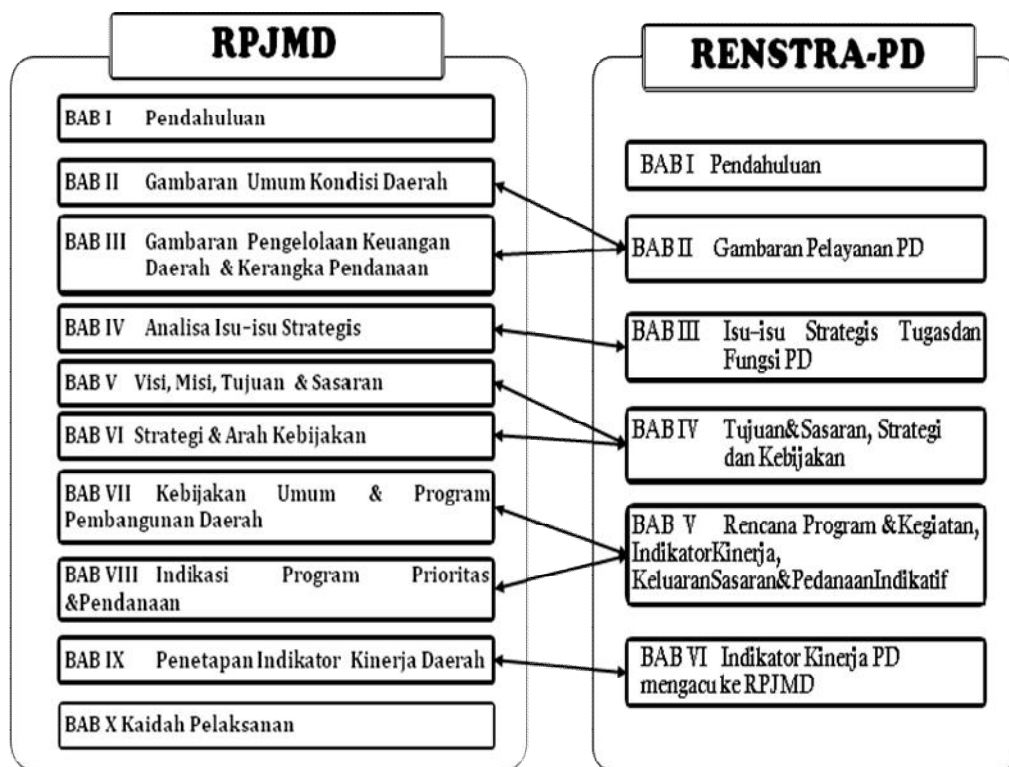
Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo serta mengacu pada, Renstra Kementerian Tenaga Kerja, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Purworejo merupakan pedoman bagi Dinperinaker dalam menyusun Kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) yang disinkronkan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Hubungan antar dokumen tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar :1.1
Hubungan Renstra dengan RPJMD



Gambar : 1.2
 Hubungan isi RENSTRA dengan RPJMD



1.5. Sistematika Penulisan

RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)
 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo

disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Sistematika sbb :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaah renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

5.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

6.2. Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD
dengan Indikator Program dan Kegiatan

BAB VII : PENUTUP

I. Rekapitulasi Pendanaan

II. Definisi operasional indikator kinerja sasaran

III. Definisi operasional indikator kinerja program

IV. Visi Misi Bupati Purworejo 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2016. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum yang meliputi perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;

- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinperinaker; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II/b dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon III/a, dua Kepala Bidang dengan eselon III/b dan satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) dengan eselon IV/a serta kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sekretaris dan Kepala Bidang dibantu oleh Kasubbag dan Kasi dengan eselon IV/a, sedangkan kepala UPT dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha dengan eselon IV/b. Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tercantum dalam Lampiran dokumen ini.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai dan karyawan Dinperinaker per 1 Januari 2018 dihitung sebanyak 92 orang. Sebagian berada dilingkungan dinas sebanyak 52 orang dan sebagian lagi berada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebanyak 40 orang.

Dinas memiliki jabatan fungsional tertentu, yaitu Instruktur pada UPT Balai Latihan Kerja dan Penyuluh Perindustrian. Dimungkinkan dimasa mendatang jenis tenaga fungsional dapat bertambah seperti Pengantar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, dll

Tabel. 2.2.1.
Jumlah Pegawai Berdasar Golongan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Golongan	L	P	Σ
1	Golongan IV	8	2	10
2	Golongan III	46	21	67
3	Golongan II	14	1	15
4	Golongan I	-	-	-
5	Non PNS	13	4	17
	Jumlah	81	28	109

Sumber data : Dinperinaker

Tabel 2.2.2.
Jumlah Pegawai Struktural (Eselon)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Eselon	L	P	Σ
1	II/b	1	-	1
2	III/a	1	-	1
3	III/b	2	-	2
4	IV/a	5	3	8
5	IV/b	1	-	1
	Jumlah	10	3	13

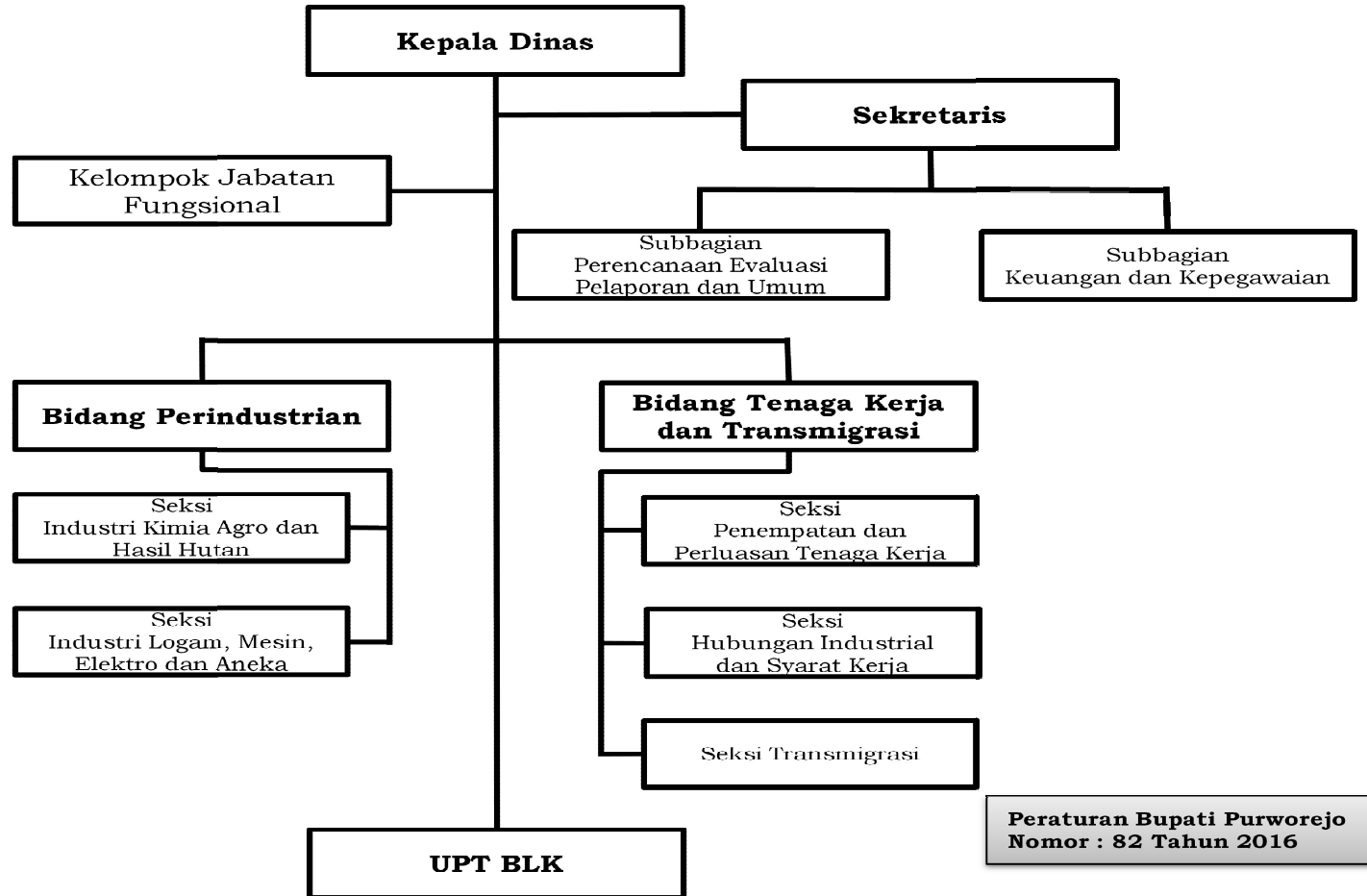
Sumber data : Dinperinaker

Tabel 2.2.3.
Jumlah Pegawai Teknis Fungsional
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Jabatan	L	P	Σ
1	Mediator Hubungan Industrial	-	2	2
2	Instruktur Pelatihan	28	6	34
3	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	4	1	5
	Jumlah	32	9	41

Sumber data : Dinperinaker

Gambar 2.2.4.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten



Tabel 2.2.4.
Kondisi Aset Awal Tahun 2017
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo

KIB	KONDISI BAIK		KONDISI RUSAK RINGAN		KONDISI RUSAK BERAT	
	UNIT	NILAI (Rp)	UNIT	NILAI (Rp)	UNIT	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Tanah	3	541.258.000,00				
Peralatan dan Mesin		3.473.710.048,90			1	311.000
Gedung dan bangunan		1.835.684.346,60				
Jalan, irigasi dan jaringan		223.722.250				
Aset tetap lainnya		20.902.000				
Aset tidak berwujud		nihil				
Jumlah	3	5.554.018.645,50	-	-	1	311.000

Sumber data : Buku KIB Dinperinaker 2017

Tabel 2.2.9.
Daftar Perusahaan berdasar KLUI
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
Tahun 2015

KLUI (Sektor)	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Perangkat Hubungan Industrial			
		WNI	WNA	Kecil	Sedang	Besar	PP	PKB	SP	LKS Bipartit
1	4	1079	0	2	1	1	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	174	6045	6	166	13	4	40	7	3	24
4	8	304	0	5	2	1	1	0	2	1
5	18	209	0	17	1	0	0	0	0	0
6	155	2015	0	129	17	1	19	0	1	23
7	3	692	0	1	1	1	0	1	1	2
8	79	1591	0	64	12	2	9	1	2	3
9	71	1614	2	55	13	3	7	1	6	2
Jumlah	512	13,549	8	439	60	13	76	10	16	56

Sumber data : Database Dinsosnakertrans Tahun 2015

Keterangan Tabel

KLUI : 1. Pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar eceran, rumah makan dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Lembaga keuangan/bank, 9. Jasa kemasyarakatan, sosial

WNI = Warga Negara Indonesia, WNA = Warga Negara Asing; PP = Peraturan Perusahaan; PKB = Perjanjian Kerja Bersama; SP = Serikat Pekerja; LKS = Lembaga Kerja Sama; Kecil = < 25 orang; Sedang = 26s/d99 org; Besar = > 100 Org

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Keadaan Lima Tahun Yang lalu

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinperinaker untuk non urusan keseluruhannya
mencapai angka 100% dengan asumsi pada non urusan
tidak menyisakan permasalahan pada tahun berikutnya.

Persentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian mampu mencapai target yang ditetapkan pada lima tahun terakhir, bahkan pada tahun ke empat mampu mencapai 0,10% di atas target yang ditetapkan.

Penurunan jumlah penganggur selama lima tahun mampu melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi pertumbuhan pencari kerja lebih tinggi terhadap penyerapannya. Keadaan ini menjadikan tingkat pengangguran senantiasa menjadi isu daerah dan isu nasional.

Tingkat capaian ketransmigrasian belum pernah mampu mencapai target selama lima tahun. Realisasi senantiasa berada di bawah target yang ditetapkan. Bahkan di akhir tahun Renstra tidak memberangkatakan transmigran. Keadaan ini dikarenakan penempatan transmigran merupakan kegiatan yang bersifat fasilitasi dan sangat tergantung kuota transmigran dari provinsi.

Tabel. 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinsosnakertrans
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (%)					Realisasi capaian tahun ke (%)					Rasio capaian pada tahun ke (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi kantor				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase pelaksanaan kualitas sarana dan prasarana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase pelaksanaan system pelaporan capaian kinerja perencanaan dan keuangam				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Turunnya jumlah penganggur				100	100	100	100	100	100	100	102,19	97,62	130,76	100	100	102,19	97,62	130,76
5	Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi				100	100	100	100	100	68,57	77,50	97,50	58,33	0	68,57	77,50	97,50	58,33	0
6	Turunnya angka kemiskinan				100	100	100	100	100	100	98,51	98,57	99,62	133,42	100	98,51	98,57	99,62	133,42
7	Prosentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk				100	100	100	100	100	100	98,51	98,57	99,62	133,42	100	98,51	98,57	99,62	133,42

Sumber data : LKjIP tahun 2016

Tabel. 2.3.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskoperindagpar
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (%)					Realisasi capaian tahun ke (%)					Rasio capaian pada tahun ke (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Koperasi dan UMKM																		
	Prosentase jumlah koperasi sehat				50%	56%	62%	68%	75%	40%	57%	76%	66,65 %	81,33%	80,66	101%	122,16	98,01471	108,44
	Prosentase peningkatan jumlah UMKM				10%	0	0,17	19%	19%	17%	19%	24%	35%	42%	170	112%	140,71	184,2105263	221,0526316
	Industri																		
	Prosentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian				3%	6%	9%	12%	15%	3%	6%	9%	12,10 %	15%	100	10000 %	100	100,8333333	100
	Perdagangan																		
	Prosentase peningkatan jumlah klaster yang terbentuk.				10%	10%	10%	25%	30%	10%	10%	10%	125%	135%	100	100	100	500	450
	Prosentase peningkatan transaksi produk lokal dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor perdagangan				15%	15%	15%	18%	23%	10%	17%	17%	17%	19%	67	113%	115,93	95,44444444	82,60869565
	Prosentase pertumbuhan ekspor				10%	10%	10%	35%	60%	8%	34%	525%	7%	47,00%	80	336%	5.250,00	21,22857143	78,33333333
	Prosentase rata-rata pertumbuhan PDRB				9,79	9,79	9,79 %	9,79 %	9,79 %	9,79	10,46 %	10,19%	4,90%	5,09%	100	1%	104,09	50%	51,9918284
	Pariwisata																		
	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB				-	0,00	15,00	16%	16%	-	0,00	16 %,90	17%	17%				107,9365079	107,9365079
	Kontribusi pariwisata terhadap PAD				0	0	14%	15%	17%	0	0	14%	15%	17%			100,00	100	100
	ESDM																		
	1. Dusun tanpa akses listrik				9%	8%	0	0	0	8%	8%	0	0	0	89	1	-	-	-
	2. Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit)				4%	4%	0	0	0	4%	4%	0	0	0	100	1	-	-	-

Sumber Data : Renstra 2016-2021 Diskoperindagpar

Tabel. 2.3.3.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinsosnakertrans
 Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Uraian (000.000)	Anggaran pada tahun Ke (000)					Realisasi pada tahun Ke (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang- ga- ran	Rea- li- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Belanja	6.645.432	7.867.346	9.698.076	11.873.111	15.555.118	6.501.027	7.445.097	9.458.438	10.843.237	14.306.211	97,8%	94,6%	97,5%	91,3%	92,0%		
Belanja langsung	1.121.552	1.689.567	3.831.339	5.092.146	8.540.596	1.083.294	1.599.399	3.620.261	4.761.348	7.419.455	96,6%	94,7%	94,5%	93,5%	86,9%		
Pelanja tak Langsung	5.523.879	6.177.779	5.866.737	6.780.964	7.014.521	5.417.733	5.845.697	5.838.176	6.081.888	6.886.755	98,1%	94,6%	99,5%	89,7%	98,2%		

Sumber Data : Renstra 2016-2021 Dinsosnakertrans

Tabel. 2.3.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Diskoperindagpar
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Uraian (000.000)	Anggaran pada tahun Ke (000)					Realisasi pada tahun Ke (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang-ga-ran	Rea-li-sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Koperasi	190.155.000	170.250.000	374.250.000	684.248.400	1.059.263.400	186.815.500	164.864.250	350.020.227	420.870.183	1.005.913.404	98,24380111	96,83656388	205,5919101	61,50839125	94,9634816	0,3292	0,3196
Urusan Perindustrian	366.130.213	2.211.716.560	562.600.000	1.108.700.000	966.953.280	340.334.750	2.014.119.467	518.707.000	959.035.106	518.999.674	92,95456587	91,0658944	23,45268871	86,50086642	53,67370738	0,8979	0,7131
Urusan Perdagangan	1.980.961.250	2.268.227.700	14.143.884.150	9.808.378.400	7.478.162.700	1.946.920.519	2.222.967.816	8.658.354.863	9.533.019.980	7.238.615.210	98,28160541	98,00461462	381,7233544	97,19262034	96,79670663	0,8193	0,3794
Urusan Pariwisata	-	-	2.402.622.000	5.078.602.500	4.019.709.900	-	-	2.065.579.831	4.989.591.268	3.889.855.688	0	0	85,97190199	98,24732824	96,7695626	0,0189	0,0390
Adum	172.101.600	282.335.000	283.456.600	715.338.200	461.422.400	166.833.005	273.020.836	227.212.381	685.509.630	403.249.577	96,93867169	96,70102396	80,47616519	95,8301444	87,39271804	0,2349	0,2147
Pendapatan	1.528.722.204	1.646.493.000	2.470.974.532	3.535.321.000	3.604.070.101	1.549.910.835	1.631.206.500	2.501.564.385	3.248.243.700	3.789.792.800	101,3860354	99,07157212	151,9328892	91,87973878	105,1531378	0,0160	0,0102
Belanja Tidak Langsung	8.560.870.610	8.461.081.000	10.517.496.000	10.029.083.572	11.290.091.302	7.794.496.931	7.966.767.719	8.479.954.733	9.319.398.591	9.362.473.907	91,04794694	94,15779992	100,2230653	92,92373051	82,92646761	0,0002	0,1619
Jumlah	12.798.940.877	15.040.103.260	30.755.283.282	30.959.672.072	28.879.673.083	11.985.311.540	14.272.946.588	22.801.393.420	29.155.668.458	26.208.900.260	579	576	1.029	624	618	0,1148	0,0067

Sumber Data : Renstra 2016-2021 Diskoperindagpar

Urusan ketenagakerjaan selama lima tahun ini di dukung program dan kegiatan dalam rangka menanggulangi masalah ketenagakerjaan seperti menempatkan tenaga kerja, hubungan industrial dan produktivitas tenaga kerja.

Urusan ketenagakerjaan di dukung oleh 3 program yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Tabel 2.3.4.
Layanan Urusan Ketenagakerjaan
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendaftar AK I / Kartu Kuning	orang	9.287	10.728	12.769	11.380	9.610
2	Pendaftaran Lowongan Kerja	orang	4.418	3.633	2.400	2.061	2010
3	Penempatan AKL	orang	291	95	30	40	741
4	Penempatan AKAD	orang	2.268	1.774	1.506	1.458	527
5	Penempatan AKAN	orang	544	606	617	668	731
6	Sosialisasi Tenaga kerja	orang	-	60	70	70	70
7	Monev AKADAKAN	lokasi	-	3	2	1	1
8	Penyusunan PTKD	dok	-	-	-	-	1
9	Job Fair	Keg.	-	-	-	1	1
10	Padat Karya Infrastruktur	orang	-	-	440	264	880
11	Teknologi Tepat Guna	orang	-	15	45	15	40
12	Pelatihan non institusional kej. Sepeda Motor	orang	-	48	32	16	48
13	Pelatihan non institusional kej. Processing	orang	-	48	48	64	64
14	Pelatihan non institusional kejuruan Menjahit	orang	-	64	32	32	64
15	Pelatihan non institusional kejuruan Otomotif	orang	-	16	16	32	
16	Pelatihan non institusional kejuruan Bordir	orang	-	32	-	-	16
17	Pelatihan non institusional kejuruan Mebeler	orang	-	-	16	-	-
18	Pelatihan non institusional kejuruan Batik	orang	-	-	272	128	32
19	Pelatihan non institusional kejuruan Las	orang	-	-	16	16	-
20	Pelatihan non institusional kejuruan Komputer	orang	-	-	-	16	-
21	Pelatihan non institusional kej. Pertukangan	orang	-	-	-	16	-

22	Pelatihan non institusional kejuruan teknisi komputer dan perakitan	orang	-	-	16	-	-
23	Pelatihan institusional kej. Sepeda motor	orang	-	-	-	16	-
24	Pelatihan institusional kejuruan Menjahit	orang	-	-	-	16	-
25	Pelatihan institusional kejuruan Elektronika	orang	-	-	-	16	-
26	Penyuluhan dan penyebarluasan informasi pemagangan kerja	orang	70	50	80	80	80
27	Pembinaan LPKS untuk peningkatan kinerja	Lemba- ga	40	40	45	35	34
28	Pembinaan desa produktif	Kec.	-	-	16	-	-
		desa				2	2
29	Pembinaan Hubungan Industrial dan syarat kerja	perusa haan	53	15	35	30	50
30	Rata angka KHL	rupiah	851.31 5,06	875.57 7,66	909.93 1,04	1.164 .197, 89	1.254.7 33.26
31	Usulan UMK (000)	rupiah	755	809	849	910	1.165
32	Monitoring THR ke Perusahaan	Perusa haan	-	-	-	-	60
33	Pemeriksaan pelaksanaan Undang-undang keselamatan kerja di perusahaan	perusa haan	25	18	20	100	100
34	Sosialisasi gender tenaga kerja	orang	500	-	-	100	200
35	Pembinaan program jaminan sosial tenaga kerja	orang	250	-	-	50	-
36	Pendataan pekerja anak	dok	1	-	-	1	1
37	Jumlah Pekerja Anak	orang	-	-	-	-	25
38	Sosialisasi Undang-undang tentang ketenagakerjaan	orang	-	40	50	50	-
39	Sosialisasi Upah Minimum kabupaten (UMK)	orang	100	100	100	100	100
40	Penyuluhan pencegahan / penyelesaian PHI/PHK	orang	-	-	-	40	40
41	Pengujian Peralatan K3 di perusahaan	obyek K3	-	-	-	60	60
42	Pemeriksaan perlindungan tenaga kerja malam wanita di perusahaan	perusa haan	-	-	-	17	-

Sumber Data : Dinsosnakertrans

Urusan ketrasmigrasian di dukung oleh 1 program yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tabel 2.3.5.
Layanan urusan ketrasmigrasian
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Purworejo

No	Uraian Satuan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kerjasama Transmigrasi	Kesepahaman	-	1	3	2	0
2.	Pembe-rangkatan transmigrasi	kk	24	11	19	5	0
3.	Animo Transmigrasi	orang	61	55	60	150	200
4.	Pendaftar Transmigrasi	orang	-	-	71	61	96

Sumber Data : Dinsosnakertrans

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2021 didukung 6 program :

1. Program Agribisnis Komoditas Unggulan disektor Hilir
2. Program pengelolaan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
6. Program Penyelenggaraan Transmigrasi

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Industri pada lima tahun yang akan datang dihadapkan dengan tantangan dalam rangka meningkatkan sentra industri kecil khususnya tentang produksi, pemasaran, regional dan ekspor. Harapan

lebih jauh diharapkan produk industri kecil menengah mampu memiliki branding.

Penempatan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif. Tantangan ini juga menjadi tugas yang tidak ringan bagi perangkat daerah terlebih lagi laju pertumbuhan pencari kerja tidak sebanding dengan kemampuan pasar kerja menampung tenaga kerja.

Guna terwujudnya penempatan tenaga kerja yang aman dan benar diharapkan dimasa mendatang hal-hal berikut dapat terwujud :

1. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku
2. Pencari kerja memahami mekanisme penempatan
3. Koordinasi dengan instansi terkait secara periodik
4. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam

Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah saat ini sesuai tugas dan wewenangnya, kemenakertrans terus memberikan kontribusi nyata dan terukur, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, salah satunya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas.

Salah satu upaya adalah mengoptimalkan/ merevitalisasi UPT-BLK sebagai sebuah lembaga pelatihan pemerintah yang berada di kabupaten Purworejo yang sangat dibutuhkan masyarakat purworejo guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja masyarakat purworejo dalam menghadapi era globalisasi tenaga kerja. Revitalisasi Balai Latihan Kerja antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) instruktur dan kapasitas management UPT-BLK antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi instruktur
 - b. Mengikuti Ujian Assesor
 - c. Studi banding
 - d. Mengoptimalkan tim angka kredit.
2. Sinergis dengan program pusat dalam rangka mengoptimalkan sistem pelatihan kerja nasional.
 - a. Optimalisasi program 3 in 1
 - b. Optimalisasi jejaring/ penempatan Tenaga Kerja
 - c. Dana pendamping untuk kegiatan atau program
 3. Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan SKKNI (Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
 - a. Peningkatan Sarana dan prasarana
 - b. Membentuk tempat uji kompetensi
 - c. Uji Kompetensi peserta pelatihan.

Hubungan industrial diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif. Berikut beberapa hal yang diharapkan lima tahun mendatang :

1. Serikat pekerja telah berperan dalam menciptakan industrial harmonis;
2. Perusahaan menerima pembentukan serikat pekerja/buruh;
3. Tingginya kesadaran pekerja mandiri dan perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial;
4. Perusahaan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Perselisihan kerja dapat diselesaikan secara bipartit;
6. Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) sudah sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
7. Terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
8. Perusahaan tidak melakukan relokasi ke luar negeri.
9. Meningkatnya kesejahteraan pekerja melalui fasilitas penerapan skala upah, kualitas pembuatan PP /PKB,

berdirinya koperasi pekerja, meningkatnya kualitas kelembagaan SP/SB

10. Kaidah-kaidah Higiene Perusahaan, Ergonomi, dan K3 sudah diterapkan dengan baik di tempat kerja;
11. Tindakan/perlakuan diskriminatif di dunia kerja semakin sedikit;
12. Penerapan outsourcing tidak menimbulkan masalah;
13. Perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan;

Salah satu faktor tingginya angka pengangguran di Kabupaten Purworejo karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja. Penyelenggaraan pelatihan non institusional dan institusional akan dapat meningkatkan keterampilan para pencari kerja sehingga ada alternatif untuk berwirausaha mandiri. Adapun pembinaan desa produktif harapannya dapat lebih meningkatkan produktivitas masyarakat yang berada desa tersebut. Sedangkan pembinaan terhadap LPKS diharapkan mampu meningkatkan standar kelulusan para pencari kerja.

Dengan demikian, untuk 5 (lima) tahun mendatang, masih diperlukan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat, pembinaan LPKS serta pembinaan desa produktif.

Urusan Ketransmigrasian diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif.

1. Penempatan transmigran yang telah memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan penempatan
2. Meningkatnya pelayan informasi transmigrasi

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah Industri kecil menengah yang didominasi berbasis pertanian, kehutanan, dan industri rumah tangga yang cukup besar (± 22.63 unit usaha) serta potensi wisata yang potensial dikembangkan menjadikan sektor industri memiliki prospek lebih baik untuk dikelola lebih profesional.

Beberapa peluang pada masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Urusan Tenaga kerja :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Lembaga Pelatihan Perusahaan.
2. Menciptakan koordinasi yang intensif agar siswa pasca pelatihan ditangani terpadu dengan SKPD lain.
3. Mengoptimalkan pegawai Mediator Hubungan Industrial
4. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk tindakan Unit Reaksi Cepat terhadap adanya kasus kecelakaan kerja
5. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web.
6. Meningkatkan Jangkauan informasi prosedur penempatan tenaga kerja hingga di tingkat desa/kelurahan.
7. Permintaan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Meningkatkan kompetensi instruktur.

Urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo merupakan kegiatan fasilitasi. Dengan demikian sepanjang kegiatan transmigrasi masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maka di daerah kegiatannya bersifat fasilitasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam suatu perencanaan karena berdampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila isu strategis tidak diantisipasi diperkirakan akan menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak dimanfaatkan (diantisipasi) akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi isu strategis dapat menggunakan model pembobotan berdasarkan skor kriteria pembobotan yang telah ditentukan. Berikut kriteria dan skor pembabatan yang kami pergunakan.

Tabel : 3.1.1.
Skor kriteria pembobotan

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dinas	25
2	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
3	Memiliki dampak terhadap masyarakat (publik)	15
4	Memiliki pengaruh yang besar terhadap program (renstra) kementerian/ provinsi	10
5	Sulit penanganannya	10
6	Melibatkan stake holders dalam penanganannya	10
7	Merupakan isu lintas daerah/ nasional	10
	Skor	100

3.1.1. Pengumpulan dan Pengelompokan Isu Strategis

Berbagai informasi isu strategis dapat berasal dari internal Perangkat Daerah maupun Eksternal Perangkat

Daerah. Tidak semua informasi tentang isu strategis dapat diangkat menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan telah diketahuinya metode identifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka langkah berikutnya mengumpulkan dan mengelompokkan berdasarkan urusan. Berikut adalah isu strategis berdasarkan urusan.

1. Isu strategis urusan Perindustrian
 - a. Industri kecil menengah jumlah dan jenis usaha sangat heterogen, Jumlah SDM terbatas, sehingga dalam pembinaannya kurang optimal.
 - b. Sistem informasi manajemen industri belum tersedia sehingga menyulitkan dalam pendataan dan penilaian perkembangan produk industri kecil dan menengah.
 - c. Pertumbuhan industri kecil menengah sangat lambat terkendala oleh pemasaran produk, karena belum mampu bersaing dengan produk luar daerah.
 - d. Belum tertibnya pengelolaan industri kecil dan menengah.
2. Isu strategis urusan ketenagakerjaan
 - a. Calon tenaga kerja belum dibekali ketrampilan kerja.
 - b. Peralatan pelatihan untuk melatih tenaga kerja berbasis masyarakat belum mengikuti teknologi.
 - c. Lembaga Pelatihan Kerja belum terakreditasi
 - d. Rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja
 - e. Rendahnya/sedikitnya calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
 - f. Pemberdayaan pasca pelatihan berbasis masyarakat belum optimal
 - g. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.
 - h. Rendahnya pemahaman mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- i. Masih lambatnya penyelesaian PHI/PHK di peradilan hubungan industrial
- j. Masih rendahnya kemampuan pengurus SP/SB dalam memahami aturan ketenagakerjaan
- k. Masih sedikit dan belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan
- l. Teknis penerapan Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap pekerja mandiri dan perusahaan.
- m. Penggunaan peralatan berat dan semakin modern di perusahaan menimbulkan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang semakin kompleks.
- n. Masih rendahnya penerapan UMK oleh perusahaan
- o. Jumlah Pengurangan / Pengentasan Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- p. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap penerapan peraturan ketenagakerjaan
- q. Penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang ketenagakerjaan
- r. Reaksi stake holder ketenagakerjaan terhadap dijalankannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asia, contohnya penolakan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing di lingkungan industri.
- s. Jumlah kesempatan kerja lebih kecil dibanding jumlah pencari kerja
- t. Perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja
- u. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar

3. Isu strategis urusan ketransmigrasian
 - a. Relatif Tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat.
 - b. Program transmigrasi masih tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.
 - c. Lokasi calon penempatan transmigrasi masih ada yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik sarana, prasarana dan administrasi pertanahan ketika akan serah terima transmigran
 - d. Terbatasnya kuota penempatan dari propinsi/kementerian

3.1.2. Perumusan dan Prioritas Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi isu strategis, pengumpulan dan pengelompokan isu strategis sesuai skor kriteria pembobotan, selanjutnya merumuskan prioritas isu strategis.

Tabel 3.1.2.1.
Pembobotan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Perindustrian								
a	Industri kecil menengah jumlah dan jenis usaha sangat heterogen, Jumlah SDM terbatas, sehingga dalam pembinaannya kurang optimal	25	20	15	10	10	10	10	100
b	Sistem informasi manajemen industri belum tersedia sehingga menyulitkan dalam pendataan dan penilaian perkembangan produk industri kecil dan menengah	25	20	15	10	10	10	-	90
c	Pertumbuhan industri kecil menengah sangat lambat terkendala oleh pemasaran produk, karena belum mampu bersaing dengan produk luar daerah	25	20	15	10	10	10	10	100
d	Belum tertibnya pengelolaan industri kecil dan menengah	25	20	15	10	10	10	-	90
2	Urusan Ketenagakerjaan								
a	Calon tenaga kerja belum dibekali ketrampilan kerja	25	20	15	10	10	10	10	100
b	Peralatan pelatihan untuk melatih tenaga kerja berbasis	25	20	15	10	10	10	10	100

	masyarakat belum mengikuti teknologi								
c	Lembaga Pelatihan Kerja belum terakreditasi	25	20	15	10	10	5	5	90
d	Rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja	25	20	15	10	10	5	-	85
e	Rendahnya/sedikitnya calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	25	20	15	10	5	-	-	75
f	Pemberdayaan pasca pelatihan berbasis masyarakat belum optimal	25	20	15	10	5	10	-	85
g	Rendahnya pemahaman mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial	25	20	15	10	10	-	-	80
h	Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap penerapan peraturan ketenagakerjaan	25	20	15	10	10	10	10	100
i	Masih rendahnya penerapan UMK oleh perusahaan	25	20	15	10	-	-	-	70
j	Masih sedikit dan belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan	25	20	15	10	10	10	10	100
k	Jumlah Pengurangan / Pengentasan Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	25	20	15	10	5	10	5	90
l	Masih rendahnya kemampuan pengurus SP/SB dalam memahami aturan ketenagakerjaan	25	20	15	10	10	-	-	80
m	Masih lambatnya penyelesaian PHI/PHK di peradilan hubungan industrial	25	20	15	10	5	5	-	80
n	Penggunaan peralatan berat dan semakin modern di perusahaan menimbulkan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang semakin kompleks	25	20	15	10	5	-	-	75
o	Teknis penerapan Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap pekerja mandiri dan perusahaan.	25	20	15	10	5	5	5	85
p	Penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang ketenagakerjaan	25	20	15	10	5	-	10	85
q	Reaksi stake holder ketenagakerjaan terhadap dijalankannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asia, contohnya penolakan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing di lingkungan industri.	25	20	15	10	10	10	-	90
r	Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.	25	20	15	10	10	10	-	90
s	Jumlah kesempatan kerja lebih kecil dibanding jumlah pencari kerja	25	20	15	10	10	10	10	100

t	Perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja	25	20	15	10	10	10	10	100
u	Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar	25	20	15	10	10	10	10	100
v	Kurangnya kualitas tenaga kerja	25	20	15	10	10	10	-	90
w	Rendahnya pemahaman mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial	25	20	15	10	10	-	-	80
x	Masih sedikit dan belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan	25	20	15	10	10	-	-	80
y	Kurangnya Kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan pekerja / buruh ke program jaminan sosial	25	20	15	10	10	10	-	90
z	Adanya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	25	20	15	10	5	5	-	80
aa	Jumlah Pengurangan / Pengentasan Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	25	20	15	10	10	10	-	90
ab	Kurangnya penerapan peraturan ketenagakerjaan oleh perusahaan	25	20	15	10	5	5	5	85
3	Urusan Ketransmigrasian								
a	Relatif Tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat	25	20	15	10	10	10	10	100
b	Program transmigrasi masih tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.	25	20	15	10	10	10	10	100
c	Lokasi calon penempatan transmigrasi masih ada yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik sarana, prasarana dan administrasi pertanahan ketika akan serah terima transmigran	25	20	15	10	5	10	5	90
d	Terbatasnya kuota penempatan dari propinsi/kementerian	25	20	15	10	5	10	5	90

Berdasarkan pembobotan isu strategis diatas dapat disajikan skala prioritas isu strategis pada tiap urusan sbb:

Skala Prioritas isu strategis urusan Perindustrian

- a. Industri kecil menengah jumlah dan jenis usaha sangat heterogen, Jumlah SDM terbatas, sehingga dalam pembinaannya kurang optimal

- b. Pertumbuhan industri kecil menengah sangat lambat terkendala oleh pemasaran produk, karena belum mampu bersaing dengan produk luar daerah.

Skala Prioritas isu strategis urusan ketenagakerjaan

- a. Calon tenaga kerja belum dibekali ketrampilan kerja
- b. Peralatan pelatihan untuk melatih tenaga kerja berbasis masyarakat belum mengikuti teknologi Pemberdayaan pasca pelatihan berbasis masyarakat belum optimal
- c. Jumlah kesempatan kerja lebih kecil dibanding jumlah pencari kerja.
- d. Perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.
- e. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap penerapan peraturan ketenagakerjaan.
- f. Masih sedikit dan belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan

Skala Prioritas isu strategis urusan Ketransmigrasian

- a. Relatif Tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat
- b. Program transmigrasi masih tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.

Dari ketiga urusan tersebut diatas, isu strategis tiap urusan dapat disarikan sebagai berikut :

- Urusan Perindustrian, Pertumbuhan industri kecil menengah sangat lambat terkendala oleh pemasaran produk, karena belum mampu bersaing dengan produk luar daerah
- Urusan ketenagakerjaan, laju pencari kerja dengan skill rendah lebih tinggi daripada kesempatan kerja serta belum optimalnya hubungan industrial
- Urusan ketransmigrasian, animo masyarakat bertransmigrasi tidak sebanding dengan kuota transmigran

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Purworejo adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan.

Visi diatas secara makro dapat dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud Semakin Sejahtera

1. Semakin sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok pendapatan;
2. Peningkatan kemudahan aksesibilitas sarana produksi, sandang, pangan, papan, sumber-sumber ekonomi, lapangan pekerjaan, serta sarana prasarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan yang berkualitas;
3. adanya lingkungan yg kondusif untuk melakukan aktivitas-aktivitas rekreatif (seni, budaya dan olahraga), keagamaan, kepercayaan thd Tuhan YME, ketentraman keluarga dan ketertiban masyarakat, kepastian hukum.

Yang dimaksud Berbasis Pertanian

Berbasis pertanian maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pengelolaan potensi pertanian melalui :

- a. sumber daya yaitu petani, lahan pertanian yang berkelanjutan, penyuluh pertanian, teknologi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan;
- b. sarana prasarana produksi pertanian yang menjamin pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas.

Yang dimaksud Berbasis Pariwisata

Berbasis pariwisata maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pengelolaan potensi pariwisata melalui :

- a. pengelolaan pariwisata (dengan pola pengelolaan oleh pemerintah daerah, pola pemberdayaan masyarakat, maupun oleh investor),

- b. penyediaan sarana prasarana pendukung yang keduanya mengarah pada peningkatan jumlah kunjungan wisata ke purworejo.

Yang dimaksud Berbasis Industri

Berbasis industri maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah dari sisi peningkatan daya saing produk yang berbasis sumberdaya local.

Yang dimaksud Berbasis Perdagangan

Berbasis Perdagangan maksudnya adalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada:

- a. pengembangan sarpras perdagangan
- b. perlindungan konsumen;
- c. Dukungan promosi dan pemasaran produk

Yang dimaksud berwawasan Budaya

Yang dimaksud dengan berwawasan budaya adalah segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan budaya-budaya positif yang mendukung produktivitas, yaitu etos kerja, integritas, gotong royong/ kerjasama maupun kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Yang dimaksud berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan prinsip untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjamin berlangsungnya proses pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud berwawasan Ekonomi Kerakyatan

Yang dimaksud dengan berwawasan ekonomi kerakyatan adalah segala upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan dukungan terhadap pelaku ekonomi mikro dan kecil agar mampu bersaing dan meningkat kapasitasnya.

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.

2. *Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.*
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. *Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.*
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum pada misi ke II (dua) dan misi ke VI (enam).

Pada misi ke II (dua) terdapat beberapa program tentang urusan perindustrian dan urusan ketenagakerjaan. Program pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Program Agribisnis Komoditas Unggulan disektor Hilir
2. Program pengelolaan Industri Kecil dan Menengah

Pada program urusan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan kerja
3. Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja
4. Program Penyelenggaraan Transmigrasi

Untuk mendukung program urusan ketenagakerjaan dan perindustrian dilaksanakan program urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Dengan teridentifikasinya Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah tersebut

Beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan Perindustrian adalah Pertumbuhan industri kecil menengah sangat lambat terkendala oleh pemasaran produk, karena belum mampu bersaing dengan produk luar daerah.

Pada urusan ketenagakerjaan, faktor penghambat yang dominan adalah tidak seimbang laju pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan lowongan kerja. Keadaan ini dikarenakan para pencari kerja belum memiliki ketrampilan berbasis kompetensi serta kecilnya penyerapan tenaga kerja.

Pada urusan ketrasmigrasian faktor penghambat utama adalah sistem kuota transmigran dari pemerintah provinsi/pemerintah pusat. Tingginya animo transmigran tidak sebanding dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah provinsi/pusat. Salah satu penyebabnya karena penempatan transmigran merupakan kegiatan fasilitasi.

Sementara beberapa faktor pendorong dalam rangka mewujudkan visi Bupati Kepala daerah pada urusan Perindustrian adalah besarnya jumlah industri kecil menengah yang berbasis pertanian, kehutanan, dan berbasis rumah tangga serta potensi obyek wisata yang cukup banyak merupakan aset strategis guna mendukung visi misi bupati.

Faktor pendorong pada urusan ketenagakerjaan dalam mewujudkan visi Bupati adalah tersedianya jaringan on line bursa kerja yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Faktor pendorong lainnya adalah dimilikinya Unit Pelayanan

Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja agar mampu berkompetisi dalam pasar kerja.

Pada urusan transmigrasi, tingginya animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi merupakan faktor pendorong dalam mewujudkan visi misi bupati.

3.3. Telaah Renstra KL/ dan Renstra Propinsi

Pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan RPJPD dengan visinya dijabarkan kedalam beberapa misi. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Purworejo telah ditetapkan bertumpu pada misi kedua dengan fokus pada perwujudan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan difokuskan pada misi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri Padat Karya.

Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Purworejo mempunyai potensi unggulan yang cukup lengkap meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai jenis produk, pertanian, perkebunan, kayu, perikanan dan hasil kelautan, pertambangan, perdagangan dan jasa-jasa dan simpul pariwisata dengan fokus pada pengembangan wilayah untuk pusat layanan lokal dan propinsi.

Dilihat dari rencana strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong. Terlebih lagi permasalahan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kondisi di kabupaten.

Berdasar data kementerian tersebut juga berorientasi pada Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan visi-nya, Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Atas dasar visi tersebut masing-masing kementerian menyusun rencana strategis lima tahunan dengan program masing-masing adalah :

Program Kementerian Tenaga Kerja :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- c. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

Program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

- a. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
- b. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan transmigrasi

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang mengampu urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi ada dua dinas yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua dinas tersebut juga berorientasi pada Visi Gubernur terpilih. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Problematika urusan perindustrian dan tenaga kerja di Jawa Tengah relatif sama dengan Kabupaten Purworejo. Belum mampu bersaing industri kecil menengah dan tingginya angka pencari kerja, yang identik dengan angka penganggur, masih menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian.

Urusan ketransmigrasian di Kabupaten Purworejo bersifat fasilitasi atas program/kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang tidak merencanakan penyelenggaraan transmigrasi lokal, kegiatan transmigrasi hanya menyediakan menyiapkan dan pembekalan kepada calon trnsmigran untuk ditempatkan ke luar daerah Purworejo.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo bertujuan agar terwujud Purworejo sebagai daerah Agribisnis yang maju dan lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang antara lain pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan Strategis.

Guna mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut Dinas Perinaker mempunyai peran dalam penataan kawasan, khususnya industri kecil dan menengah. Disisi lain bertanggung jawab terhadap lingkungan utamanya dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan mengantisipasi sebelum terjadi pelanggaran di lapangan.

Telaah RTRW dan KLHS urusan tenaga kerja dan transmigrasi tidak secara langsung bersinggungan dalam pelayanan tugas dan fungsi dinas. Pada urusan tenaga kerja, penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat tidak membutuhkan telaah RTRW dan kajian KLHS. Oleh karena tugas dan fungsinya bukan pembangunan fisik, bisa jadi telaah dan kajian tersebut ditangani oleh stake holder (pemangku kepentingan) teknis diluar urusan tenaga kerja dan transmigrasi. Demikian pula kegiatan transmigrasi di kabupaten Purworejo bukan pembangunan fisik.

Pemetaan permasalahan Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih sulit untuk disajikan. Ketiga permasalahan tersebut relatif tersebar di seluruh wilayah tanpa melihat kota dan desa, tanpa membedakan wilayah dataran tinggi atau rendah, tanpa melihat status pendidikan, agama, status sosial, dan sebagainya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan uraian diatas, isu strategis urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi yang nantinya akan diselesaikan melalui rencana strategis tahun 2016 sampai 2021 adalah sbb:

- Isu strategis urusan Perindustrian, belum optimalnya kegiatan agroindustri
- Isu strategis urusan ketenagakerjaan, laju pencari kerja dengan skill rendah lebih tinggi daripada kesempatan kerja serta belum optimalnya hubungan industrial yang harmonis.
- Isu strategis urusan ketransmigrasian, animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi tidak sebanding dengan kuota transmigran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Bupati Purworejo periode 2017-2021 adalah, *Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan.*

Misi Bupati Purworejo periode 2017-2021 ada sebanyak 7 (tujuh) misi. Dari ke tujuh misi tersebut ada dua misi yang erat hubungannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua misi tersebut tercantum pada misi ke-II.

Misi ke-2, *“Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan”*. Melalui misi ini pemerintah daerah memiliki tujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2021

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Menurunkan angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,1 %	4,60 %	3,90 %	3,40 %	2,90 %	2,90 %
			Meningkatnya jumlah industri	Pertumbuhan industri	0,39 %	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	3.5%

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada urusan perindustrian strategi yang dipilih adalah Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah serta tercukupinya fasilitasi pengembangan industri besar. Sedangkan kebijakan yang ditempuh pada urusan perindustrian adalah Melaksanakan pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan, peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan hidup yaitu dengan menerapkan prinsip industri ramah lingkungan.

Pada sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja ditempuh melalui 2 (dua) strategi, yaitu (1). pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan kesempatan kerja ; (2). pengembangan dan perlindungan tenaga kerja. Strategi ini ditempuh dengan dua arah kebijakan pula, yaitu (1). Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja, dengan pelatihan berbasis kompetensi, layanan permagangan, padat karya serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan informasi pasar kerja dan (2). Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan ketenagakerjaan) di perusahaan

Pada sasaran meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi ditempuh dengan strategi meningkatkan tata kelola birokrasi urusan transmigrasi melalui peningkatan pelayanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi dengan meningkatkan kualitas

data dan informasi ketransmigrasian (calon peserta maupun calon lokasi)

Pada sasaran meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah ditempuh dengan strategi meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.

Misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah daerah yang berkait dengan tugas dan fungsi Dinperinaker dapat dilihat secara detail pada table berikut.

Tabel 4.2
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

No Misi	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
II	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.			
II.1	Menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	1. pelayanan bagi pencari kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja ; 2. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	1. Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas & produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja, dengan pelatihan berbasis kompetensi, layanan permagangan, padat karya serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan informasi pasar kerja 2. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan

No Misi	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan ketenagakerjaan) di perusahaan
		Meningkatnya jumlah industri	Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah	Melaksanakan pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan, peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan

Kebijakan umum pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 s.d 2021 setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Prioritas Tahun 2017

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan kemandirian desa
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2018

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kemandirian desa

3. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
4. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2019

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan kemandirian desa
5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2020

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah

2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kemandirian desa
7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Prioritas Tahun 2021

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
4. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kemandirian desa
7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Arah Kebijakan dan Program pada setiap strategi pembangunan daerah secara detil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja		Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir					Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya jumlah industri	Pertumbuhan industri	0,10 %	2,13 %	<p>Mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan</p> <p>Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah</p>	<p>Melaksanakan usaha agribisnis dengan peningkatan sub system agroprosesing dan agromarketing komoditas unggulan (Padi, Jagung, Durian, Biofarmaka, Kambing PE, Ikan dan gula kelapa)</p> <p>Melaksanakan pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup yaitu dengan menerapkan prinsip industri ramah lingkungan</p>	<p>Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir</p> <p>Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.</p>	<p>Persentase KUB komoditas unggulan yang dibina</p> <p>Persentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaannya</p>	2,54%	11,86%
									9,70%	16,06%

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja		Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja		
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,01%	2,90%	Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui : 1. pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan kesempatan kerja ; 2. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	1. Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas & produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja, dgn pelatihan berbasis kompetensi, layanan perma-gangan, padat karya serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum utk mempertemukan pencari kerja dgn penyedia lapangan kerja dan meningkatkan ketersediaan informasi pasar kerja 2. Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan ketenagakerjaan) di pershan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun	7,50%	8,80%	
								Persentase lembaga pelatihan kerja swasta aktif	100%	100%	
								Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun	25,40%	43,20%

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja		Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir					Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	Persentase sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja	29,97%	34,84%
								Persentase perlindungan dan kesejahteraan pekerja	100%	100%
								Persentase perusahaan yg menerapkan peraturan ketenagakerjaan	48,26%	79,06%
							Program penyelenggaraan transmigrasi	Persentase layanan transmigrasi	100%	100%

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang dituangkan melalui tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan perlu didukung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program Administrasi Perkantoran dan program urusan. Program pada non urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumah tangga, sedangkan program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah.

Program Administrasi Perkantoran :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Program urusan Perindustrian :

1. Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Agribisnis Komoditas Unggulan disektor Hilir

Program urusan Tenaga Kerja

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan kerja
3. Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja

Program urusan Transmigrasi

1. Program Penyelenggaraan Transmigrasi

5.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif adalah perkiraan kebutuhan anggaran yang telah disusun disain kegiatannya. Dengan demikian, pendanaan indikatif cenderung bersifat perkiraan atas dasar rencana out put dan out come dari suatu kegiatan. Berikut Program kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020					2021			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target	Rupiah	Target	Rupiah
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pemeliharaan kendaraan dinas roda Dua	13 motor			15 motor		20 motor			21 motor		27 motor		33 motor		33 motor			
					Driver kantor				1 org		1 org			1 org		1 org		1 org		1 org			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	29 PC, 5 laptop	35 PC, 5 Laptop	27.688.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	48.790.000	35 PC, 5 laptop	53.669.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	64.790.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	72.790.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	80.790.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	348.517.000		Dinsosnakertrans
					Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			11 AC, 1 PABX (20 line)	11.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	12.118.370	11 AC, 1 PABX (20 line)	15.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	17.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	19.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	11 AC, 1 PABX (20 line)	74.185.170		Dinsosnakertrans	
					Pemeliharaan sarana dan prasarana aparat UPT LLK		1 paket	16.182.000												1 paket	16.182.000		Dinsosnakertrans
					Kendaraan roda 4				3 unit	26.098.000	3 unit	31.317.600	3 unit	37.581.120	3 unit	45.097.344	3 unit	54.116.813	3 unit	3 unit	194.210.877		
					Kendaraan roda 2				2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			
					AC				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
					Mesin pemotong Rumput				2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			
					Komputer				10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit			
					Mesin jahit manual				18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit	18 unit	18 unit	18 unit			
					Mesin jahit high speed				10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit			
					Mesin jahit multifungsi				20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit	20 unit	20 unit	20 unit			
					Mesin obras				10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit			
					Pemeliharaan sarana dan prasarana aparat UPT Tat Twam Asi		1 paket	9.598.000												1 paket	9.598.000		Dinsosnakertrans
					Komputer				2 unit	11.500.000	2 unit	13.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	17.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	2 unit	76.500.000		
					Printer				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
					Mesin Ketik				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
					Gedung				410 m2		410 m2		410 m2		410 m2		410 m2	410 m2	410 m2	410 m2			
					Mesin potong rumput				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
					TV				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
					Rehabilitasi Pagar UPT LLK		20 m2	30.000.000												20 m2	30.000.000		Dinsosnakertrans
					Rehabilitasi Ruang Instruktur & Ruang Kelas, serta Pemasangan Plafon 3 Workshop & Ruang Parkir				1.750 m2	481.671.500										1.750 m2	481.671.500		Dinsosnakertrans
					Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda						1 unit	625.000.000		156.000.000		162.000.000		172.000.000	1 unit	1.115.000.000		Dinsosnakertrans	
					Kendaraan roda dua (motor)						5 unit			6 unit		6 unit		6 unit	23 unit				
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	12.000.000	100%	14.400.000	100%	17.280.000	100%	20.736.000	100%	24.883.200	100%	89.299.200			
					Penilaian Angka Kredit				100%	12.000.000	100%	14.400.000	100%	17.280.000	100%	20.736.000	100%	24.883.200	100%	89.299.200		Dinsosnakertrans	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	47.559.700	100%	65.600.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	493.159.700			
					Penyusunan Pelaporan Keuangan	70 dokumen	70 dokumen	19.999.900	18 dokumen	25.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	45.000.000	112 dokumen	194.999.900		Dinsosnakertrans	
					Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	7 dokumen	7 dokumen	27.559.800											7 dokumen	27.559.800		Dinsosnakertrans	
					RKA, RKA-P, DPA, DPPA, RKT, RKT-P, RENJA, RENJA-P, PK, PK-P, LKPJ, LKJIP, RKO, SPP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Evaluasi Renja				16 dokumen	40.600.000	16 dokumen	50.000.000	16 dokumen	55.000.000	16 dokumen	60.000.000	16 dokumen	65.000.000	80 dokumen	270.600.000			
					Jasa perorangan administrasi perencanaan				1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang	1 orang	1 orang	1 orang			
					Penyusunan Data Dasar Pembangunan	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	195.000.000			
					Penyusunan database SKPD / PD	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000											1 dokumen	20.000.000		Dinsosnakertrans	
					Database Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi				1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	175.000.000			

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			19	20		
KETENAGAKERJAAN																								
Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	2	1	51	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga		14,83%	1.041.948.100	14,83%	532.409.445	14,83%	441.865.575	14,83%	991.337.807	14,83%	1.614.825.115	14,83%	2.223.283.352	14,83%	6.845.669.394			
			2	1	51	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga	14,83%	14,83%	1.041.948.100	14,83%	532.409.445	14,83%	441.865.575	14,83%	991.337.807	14,83%	1.614.825.115	14,83%	2.223.283.352	14,83%	6.845.669.394			
			2	1	51	1 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Sepeda Motor	Kompetensi kejuruan sepeda motor bagi pencari kerja meningkat	48 orang	16 Orang	31.265.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Orang	31.265.000	Dinsosnakertrans		
			2	1	51	2 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing	Kompetensi kejuruan processing bagi pencari kerja meningkat	48 orang	16 Orang	30.000.000	-	-	-	-	-	16 orang	77.785.000	32 orang	190.000.000	64 orang	297.785.000	Dinsosnakertrans		
			2	1	51	3 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las Industri	Kompetensi Kejuruan Las Industri Meningkat	16 orang	-	-	16 Orang	49842000*	-	-	-	-	-	-	-	16 orang	49842000*	Dinsosnakertrans		
			2	1	51	4 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Technical Support	Kompetensi Kejuruan Technical Support Meningkat	32 orang	-	-	16 Orang	41557000*	-	-	-	-	-	-	-	16 Orang	41557000*	Dinsosnakertrans		
			2	1	51	5 Pelatihan Insitusional Berbasis Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	256 orang	-	-	-	32 orang	100540000*	32 orang	111080000*	64 orang	359.999.840	64 orang	375.000.000	192 orang	734.999.840	Dinsosnakertrans		
						6 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	Pelatihan ketrampilan kejuruan processing bagi pencari kerja meningkat	64 orang	80 orang	197.903.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	197.903.100	Dinsosnakertrans		
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	-	-	32 orang	123.200.000	48 orang	195.828.000	80 orang	358.187.307	80 orang	388.918.000	80 orang	456.839.000	320 orang	1.522.972.307			
							Jasa perencanaan administrasi pelatihan	-	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-			
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	-	-	48 orang	138000000*	48 orang	164628000*	16 orang	56336693*	-	-	-	-	112 orang	358964693*			
			2	1	51	7 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	Pelatihan ketrampilan kejuruan menjahit bagi pencari kerja meningkat	64 orang	48 orang	116.028.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 orang	116.028.200	Dinsosnakertrans		
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	-	-	16 orang	45.000.000	16 orang	51.750.000	48 orang	178.538.000	48 orang	205.318.000	64 orang	315.000.000	192 orang	795.606.000			
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	-	-	16 orang	45000000*	32 orang	103500000*	-	-	-	-	-	-	48 orang	148500000*			
			2	1	51	8 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	Pelatihan ketrampilan kejuruan sepeda motor bagi pencari kerja	48 orang	48 orang	117.811.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 orang	117.811.200	Dinsosnakertrans		
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	-	-	16 orang	43.000.000	16 orang	48.200.000	64 orang	221.720.000	64 orang	254.978.000	64 orang	293.225.000	224 orang	861.123.000			
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	-	-	32 orang	86000000*	48 orang	144600000*	-	-	-	-	-	-	80 orang	230600000*			
			2	1	51	9 Pelatihan Keterampilan kejuruan Mebelair	Pelatihan ketrampilan kejuruan mebelair bagi pencari kerja meningkat	-	32 orang	81.725.400	-	-	-	-	-	16 orang	60.000.000	32 orang	140.000.000	32 orang	281.725.400	Dinsosnakertrans		
			2	1	51	10 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	Pelatihan ketrampilan kejuruan batik bagi pencari kerja meningkat	32 orang	16 orang	42.356.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 orang	42.356.200	Dinsosnakertrans		
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	-	-	16 orang	44.750.000	16 orang	51.462.500	32 orang	118.364.000	32 orang	136.118.000	16 orang	240.000.000	112 orang	590.694.500			
							Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	-	-	48 orang	134250000*	16 orang	51462500*	-	-	-	-	-	-	64 orang	185712500*			
			2	1	51	11 Monitoring pasca pelatihan	Laporan hasil monitoring	-	-	-	1 dokumen	19.662.445	1 dokumen	18.035.075	1 dokumen	26.450.000	1 dokumen	30.418.000	1 dokumen	40.000.000	5 dokumen	134.565.520	Dinsosnakertrans	
							Koordinasi lintas instansi	-	-	-	1 paket	337555*	1 paket	4964925*	-	-	-	-	-	2 paket	5302480*			
			2	1	51	12 Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT - LLK	Kompetensi Instruktur UPT LLK Meningkat	-	10 Orang	19.680.000	-	21.500.000	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	41.180.000	Dinsosnakertrans		

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah	
1		3	2 1 51 13	Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Pelatihan	Peralatan kejuruan processing	6 macam	29 macam	247.679.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 macam	247.679.000	Dinsosnakertrans	22		
					Laptop				2 unit									2 unit					
					Printer Laser PSC				1 unit									1 unit					
					LCD Proyektor				1 unit									1 unit					
					Layar Proyektor				1 unit									1 unit					
					Kabel VGA 10M				2 unit									2 unit					
					Sepeda Motor bebek 4 stroke FI				1 unit									1 unit					
					Sepeda Motor sport 4 stroke FI				1 unit									1 unit					
					Multiscan Fuel Injection System for Yamaha				1 unit									1 unit					
					Multiscan Fuel Injection System for Honda				1 unit									1 unit					
					Engine Stand 4 silinder 5K EPI				1 unit									1 unit					
					4 Gas Analyser HG 520				1 unit									1 unit					
					Pneumatic Bike Lift KW19-361				2 unit									2 unit					
					Special Tools For Honda Motorcycle				1 unit									1 unit					
					Special Tools For Yamaha Motorcycle				1 unit									1 unit					
					Jack stand 3 Ton KW05-60				2 unit									2 unit					
			2 1 51 14	Pembinaan LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)	Kapasitas Kelembagaan Lembaga pelatihan kerja Swasta meningkat	34 LPKS	34 LPKS	28.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 LPKS	28.500.000	Dinsosnakertrans			
			2 1 51 15	Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rekomendasi dan perijinan LPKS	-	34 LPKS	34.200.000	35 LPKS	39.330.000	36 LPKS	45.229.500	37 LPKS	52.013.925	38 LPKS	65.000.000	38 LPKS	235.773.425	Dinsosnakertrans				
			2 1 51 16	Pembinaan Desa Produktif	Produktivitas masyarakat desa produktif meningkat	2 desa	2 desa	102.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 desa	102.000.000	Dinsosnakertrans			
			2 1 51 17	Replikasi Desa Produktif	Replikasi Desa Produktif	-	2 desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 desa	-	Dinsosnakertrans			
			2 1 51 18	Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pemagangan Kerja	Pemahaman tentang informasi magang meningkat	80 orang	80 orang	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	27.000.000	Dinsosnakertrans			
					Informasi Pemagangan Kerja	-	80 Orang	32.400.000	80 orang	37.260.000	80 orang	42.849.000	80 orang	49.276.350	140 orang	108.219.352	460 orang	270.004.702	Dinsosnakertrans				
			2 1 51 19	Fasilitasi Pelatihan berbasis Kompetensi di UPT LLK	Kompetensi Kejuruan Meningkatkan	1 paket	400 orang	-	400 orang	-	400 orang	-	400 orang	-	400 orang	-	400 orang	-	-	Dinsosnakertrans			
			2 1 52	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		20,83%	21,73%	565.000.000	22,63%	582.413.841	23,50%	493.077.393	24,38%	1.036.034.885	25,23%	1.518.061.698	26,30%	2.061.035.751	26,30%	6.255.623.568	Dinsosnakertrans		
					Jumlah tenaga kerja yang ditangani (orang)	20,83%	21,73%	565.000.000	22,63%	582.413.841	23,50%	493.077.393	24,38%	1.036.034.885	25,23%	1.518.061.698	26,30%	2.061.035.751	26,30%	6.255.623.568	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 1	Penyusunan dan Penempatan Tenaga Kerja	Informasi pasar kerja	12	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	48.890.000	12 dokumen	53.800.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	66.000.000	12 dokumen	200.000.000	72 dokumen	548.690.000	Dinsosnakertrans		
					Jasa Pencerangan	1 orang	-	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 orang	-	-		
					Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja	70 orang	75 org	-	75 org	75 org	-	75 org	-	75 org	-	75 org	-	75 org	-	450 orang	-	-	
					Job Fair	20 perusahaan	20 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 perusahaan	-	-	-		
			2 1 52 2	Job Fair	Peluang Kesempatan Kerja	-	-	-	20 perusahaan	81.523.841	20 perusahaan	79.277.393	25 perh	116.000.000	25 perh	128.000.000	50 perh	300.000.000	140 perusahaan	704.801.234	Dinsosnakertrans		
					Peluang Kesempatan Kerja	-	-	-	5 perusahaan	13476159*	5 perusahaan	25722607*	-	-	-	-	-	-	10 perusahaan	39198766*	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 3	Monitoring Penempatan tenaga kerja AKAD	Informasi tentang hasil penempatan AKAD	0 lokasi	1 lokasi	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	-	35.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 4	Fasilitasi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Pengendalian Tenaga Kerja AKAD	-	-	-	1 lokasi	42.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	55.000.000	3 lokasi	239.061.698	3 lokasi	239.061.698	9 lokasi	625.123.396	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 5	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Revisi Tenaga Kerja	-	-	-	1 dokumen	75000000*	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	136.974.053	2 dokumen	136.974.053	Dinsosnakertrans	
					Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Pihak Ketiga)	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	125.034.885	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	125.034.885	Dinsosnakertrans	
					Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Swakelola)	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	74965115*	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	74965115*	Dinsosnakertrans	
			2 1 52 6	Fasilitasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan (Bursa Kerja Khusus, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)	-	-	-	60 lembaga	30.000.000	60 lembaga	40.000.000	60 lembaga	45.000.000	60 lembaga	75.000.000	60 lembaga	190.000.000	-	-	Dinsosnakertrans		

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2 1 52 7	Padat Karya Infrastruktur I	Penyerapan tenaga kerja sementara	-	-	66 orang	150.000.000	66 orang	160.000.000	66 orang	170.000.000	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	330 orang	850.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 8	Padat Karya Infrastruktur II	Penyerapan tenaga kerja sementara	88 orang	-	66 orang	150.000.000	66 orang	160000000*	66 orang	170.000.000	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	330 orang	690.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 9	Padat Karya Infrastruktur III	Penyerapan tenaga kerja sementara	88 orang	-	66 orang	150000000*	66 orang	160000000*	66 orang	170.000.000	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	330 orang	540.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 10	Padat Karya Infrastruktur IV	Penyerapan tenaga kerja sementara	-	88 orang	66 orang	150000000*	66 orang	160000000*	66 orang	170000000*	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	418 orang	520.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 11	Padat Karya Infrastruktur V	Penyerapan tenaga kerja sementara	-	88 orang	66 orang	150000000*	66 orang	160000000*	66 orang	170000000*	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	418 orang	520.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 12	Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) I	Perluasan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	20 orang	40 orang	20 orang	55.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	80.000.000	140 orang	440.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 13	Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) II	Perluasan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	-	20 orang	55.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	80.000.000	100 orang	330.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 52 14																			
			2 1 52 15																			
			2 1 53	Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Terwujudnya sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja	9,29%	16,10%	333.650.000	252.591.985	281.250.621	672.202.605	1.083.421.885	1.208.895.631	3.832.012.727	Dinsosnakertrans							
			2 1 53 1	Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) , Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Pemahaman tentang PP / PKB meningkat	-	50 Perusahaan	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 perusahaan	16.000.000	Dinsosnakertrans			
			2 1 53 2	Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) , Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Struktur skala Upah	Sosialisasi pembuatan PP, PKB dan struktur skala upah	-	-	75 perusahaan	-	50 Perusahaan	20.000.000	100 Perusahaan	60.000.000	100 Perusahaan	80.000.000	100 perusahaan	85.000.000	425 perusahaan	245.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 3	Fasilitasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purworejo	Melaksanakan Fasilitasi Lembaga kerjasama Tripartit kabupaten Purworejo	3 dokumen	12 bulan	45.000.000	100%	87.951.985	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	158.000.000	100%	160.000.000	100%	630.951.985	Dinsosnakertrans	
			2 1 53 4	Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja	Forseci / Sarasehan / Workshop Tripartit	-	-	100%	68659015*	100%	97933000*	100%	18000000*	100%	-	-	100%	100%	184592015*	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 5	Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja	Hubungan industrial meningkat	50 perusahaan	50 perusahaan	19.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 perusahaan	19.700.000	Dinsosnakertrans			
			2 1 53 6	Fasilitasi Dewan Pengupahan	Melaksanakan bimbingan teknis Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja	-	-	50 perusahaan	50.280.000	60 perusahaan	55.000.000	60 Perusahaan	60.000.000	60 Perusahaan	65.000.000	60 Perusahaan	70.000.000	290 perusahaan	300.280.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 7	Sosialisasi UMK	Rekomendasi UMK 2017	1 rekomendasi	1 rekomendasi	75.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 rekomendasi	75.600.000	Dinsosnakertrans			
			2 1 53 8	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur Skala	Rekomendasi hasil monitoring penerapan UMK 2016	60 perusahaan	1 rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 rekomendasi	-	Dinsosnakertrans			
			2 1 53 9	Penyuluhan Pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama	Menyusun rekomendasi usulan UMK	-	-	100%	45.360.000	100%	45.360.000	100%	54.432.000	100%	65.318.400	100%	78.667.038	100%	289.137.438	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 10	Pembinaan Hubungan Industrial dan syarat kerja bagi peserta didik SMK	Hasil monitoring dan pembinaan sistem pengupahan di	8 kali	-	100%	45360000*	100%	9072000*	-	-	-	-	-	100%	54432000*	Dinsosnakertrans			
			2 1 53 11	Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja	Pemahaman pelaku dunia usaha tentang UMK 2017 meningkat	100 orang	100 orang	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	16.000.000	Dinsosnakertrans			
			2 1 53 12	Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	Memberikan pemahaman kepada pelaku dunia usaha tentang UMK	-	-	100%	19200000*	100%	23600000*	100%	28.320.000	100%	33.984.000	100%	45.000.000	100%	107.304.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 13	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Struktur Skala Upah	Bintek Penyusunan PP, PKB dan Struktur Skala Upah	-	-	50 orang	45.000.000	100 orang	90000000*	100 orang	100.000.000	100 orang	110.000.000	100 orang	125.000.000	450 orang	380.000.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 14	Penyuluhan Pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama	Terbentuknya LKS Bipartit baru , Pemberdayaan LKS Bipartit yang sudah ada	30 perusahaan	30 perusahaan	15.000.000	-	30 perusahaan	18.000.000	30 perusahaan	21.600.000	30 perusahaan	25.920.000	30 perusahaan	36.104.000	150 orang	116.624.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 15	Pembinaan Hubungan Industrial dan syarat kerja bagi peserta didik SMK	Melaksanakan sosialisasi hubungan industrial dan persyaratan kerja bagi peserta didik SMK	-	-	-	-	1.000 anak	68000000*	1.000 anak	81.600.000	1.000 anak	97.920.000	1.000 anak	117.504.000	4.000 anak	297.024.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 16	Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja	Melaksanakan Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja bagi Pekerja	-	-	-	-	100 orang	34000000*	100 orang	40800000*	100 orang	48.960.000	100 orang	58.752.000	400 orang	107.712.000	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 17	Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	Meningkatkan Peran dan Fungsi Serikat Pekerja	-	-	-	-	50 orang	25.000.000	100 orang	60.000.000	150 orang	129.356.991	100 orang	130.000.000	400 orang	344.356.991	Dinsosnakertrans		
			2 1 53 18	Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	Meningkatkan Peran dan Fungsi Serikat Pekerja	-	-	-	-	50 orang	25000000*	-	-	-	-	-	50 orang	25000000*	Dinsosnakertrans			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020					2021			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target	Rupiah		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Terwujudnya Perlindungan dan	27,40%	27,52%	12 bulan	37,40%		46,58%		56,02%		65,48%		75,00%		75,00%		-	Dinsosnakertrans	
					Layanan Penyelesaian Kasus Hubungan	-	7.000.000	100%	14.000.000	100%	16.800.000	100,00%	20.160.000	100,00%	24.192.000	100,00%	25.144.000	100%	107.296.000			Dinsosnakertrans	
					Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan pekerja di Perusahaan	-	-	25 Perusahaan	10.000.000	25 perusahaan	11.090.621	50 Perusahaan	13.308.745	50 Perusahaan	15.970.494	50 Perusahaan	29.164.593	200 perusahaan	79.534.454			Dinsosnakertrans	
					Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan pekerja di Perusahaan	-	-	-	-	25 perusahaan	8909379*	-	-	-	-	-	-	25 perusahaan	8909379*			Dinsosnakertrans	
					Pembinaan program Jamsostek di perusahaan	-	-	-	-	50 Perusahaan	20000000*	50 Perusahaan	24000000*	50 Perusahaan	28.800.000	50 Perusahaan	34.560.000	200 perusahaan	63.360.000			Dinsosnakertrans	
					Penyuluhan Pencegahan/ Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pemutusan hubungan kerja	40 perusahaan	50 perusahaan	16.000.000	-	100 Perusahaan	64000000*	80 Perusahaan	82.781.860	200 Perusahaan	200.000.000	100 Perusahaan	214.000.000	530 perusahaan	512.781.860			Dinsosnakertrans	
					Pemahaman Pekerja dan penguasaan tentang penyelesaian PHI dan PHK meningkat	-	-	-	-	-	-	20 Perusahaan	19656540*	-	-	-	-	20 perusahaan	19656540*			Dinsosnakertrans	
					Fasilitas Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	-	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	375000000*			Dinsosnakertrans
					Layanan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	25 kasus	12 bulan	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	11.000.000			Dinsosnakertrans
					Pengujian Peralatan K3	60 obyek / a	90 alat K3	42.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 alat K3	42.750.000			Dinsosnakertrans
					Sosialisasi Pekerja Anak	-	100 orang	25.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	25.600.000			Dinsosnakertrans
					Pemeriksaan penerapan Norma Ketenagakerjaan	-	50 perusahaan	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 perusahaan	24.000.000			Dinsosnakertrans
					Operasional Tim satgas TKI	-	60 orang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 orang	20.000.000			Dinsosnakertrans

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			19	20		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
TRANSMIGRASI																								
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	3	8	##	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	0 kk	100%	303.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	303.000.000			
			3	5	##	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Layanan transmigrasi	0 kk	100%	303.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	303.000.000	Dinsosnakertrans	
			3	8	##	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	-	-	-	100%	176.192.248	100%	163.805.831	100%	350.763.256	100%	527.715.538	100%	692.608.752	100%	1.911.085.625		
			3	5	##	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Layanan transmigrasi I	-	-	-	100%	176.192.248	100%	163.805.831	100%	350.763.256	100%	527.715.538	100%	692.608.752	100%	1.911.085.625	Dinsosnakertrans	
					Layanan transmigrasi II	-	-	-	100%	163807752*	-	211194168*	-	-	-	-	-	-	100%	375.001.920				

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra PERANGKAT DAERAH.DISKOPERINDAGPAR Tahun2016.– 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Program dan Kegiatan	Definisi Operasional	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Basis Capaian per Tahun Awal Perencanaan																		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
							-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21					
Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah serta memfasilitasi pengembangan industri besar	Berkembangnya industri kecil dan menengah dan industri besar	Laju pertumbuhan PDRB	Jumlah yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sektor industri di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah (termasuk KUB Industri kecil) dalam hal manajemen usaha, kualitas dan kuantitas produksi dan pemasarannya.	prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolannya	6,52%	8,1%	1.200.634.760	9,6%	699.586.869	11,29%	700.215.327	12,87%	1.270.447.402	14,47%	1.741.461.276	16,06%	587.668.032	16,06%	6.200.013.666				
				1	Pelatihan Produk Batik Khas Purworejo	Meningkatnya ketrampilan tentang teknik pewarnaan			0	4 KUB	250.000.000	3 KUB	230.215.000	2 KUB	175.000.000	1 KUB	-	1 KUB	157.668.000	14 KUB	812.883.000				
				2	Pelatihan pengembangan produk industri kecil di pedesaan.	Meningkatnya kapasitas produksi.				5 KUB	250.000.000	5 KUB	-	5 KUB	-	5 KUB	275.000.000			5 KUB	525.000.000				
				3	Monitoring Ijin Usaha Industri	Tersedianya data hasil monitoring ijin usaha industri		16 Kec.	50.000.000				0	0	16 Kec.	70.000.000	0	0			16 Kec.	120.000.000			
				4	Pengembangan Produk Batik Khas Purworejo	Meningkatnya kapasitas produksi.				3 KUB	150.000.000														
				5	Pelatihan Industri Keci Makanan	Meningkatnya kapasitas produksi.			5 KUB	200.000.000	5 KUB	250.000.000	5 KUB	300.000.000	5 KUB	250.000.000	5 KUB	360.000.000			5 KUB	1.360.000.000			
				6	Pelatihan Industri Kecil Olahraga Jambur	Meningkatnya kapasitas produksi.			2 KUB	80.634.760			1 KUB	-	1 KUB	-					4 KUB	80.634.760			
				7	Pembinaan dan fasilitas Alat Produksi Minyak Asiri	Meningkatnya kapasitas produksi.			2 KUB	220.000.000	1 KUB	135.000.000									2 KUB	355.000.000			
				8	Pelatihan Pengembangan Bagi Kelompok Industri Kecil	Meningkatnya kapasitas produksi.			5 KUB	250.000.000															
				9	Bimbingan Penerapan SII/Ins bagipemegang IJL	Meningkatnya standard produk			0			30 perusahaan	-								30 perusahaan	-			
				10	Penyusunan Dalabase industri	Tersedianya data industri.			0	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	100.000.000		65.447.000,00	1 dokumen	-				1 dokumen	235.447.000			
				11	Pengembangan industri pengolahan komoditas produk unggulan purworejo							3 komoditas	-		300.000.000,00	5 komoditas	500.000.000				3 komoditas	800.000.000			
				12	Pelatihan Kelompok Industri Kecil.	Jumlah KUB yang dilatih.				6 KUB	300.000.000	6 KUB	-	6 KUB	330.000.000,00	6 KUB	500.000.000	6 KUB	-		6 KUB	1.130.000.000			
				13	Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional bagi Industri Kecil/Menengah (IKM)	Jumlah IKM yang diberi Sosialisasi .				30 IKM	50.000.000										30 IKM	50.000.000			
				14	Pengawasan dan Pendataan Industri	Data dan informasi tentang kondisi perusahaan industri kecil menengah			16 Kecamatan	60.000.000	16 Kecamatan	70.000.000	16 Kecamatan	80.000.000	16 Kecamatan	106.461.000	16 Kecamatan	100.000.000	16 Kec.	416.461.000					
				15	Penyusunan Raperda tentang RPIK(Rencana Pengembangan Industri Kabupaten)	Naskah Akademik, KLHS dan Raperda RPIK .			3 jenis dokumen	100.000.000											3 dokumen	100.000.000			
					Fasilitas Dekranasda	Jasa listrik, telekomunikasi dan air			12 bulan	260.625.000	12 bulan	316.800.000	12 bulan	316.800.000	12 bulan	316.800.000	12 bulan	316.800.000	12 bulan	316.800.000	12 bulan	1.527.825.000			
						Jasa tenaga show room			3 orang, 12 bulan		3 orang, 12 bulan		3 orang, 12 bulan		3 orang, 12 bulan		3 orang, 12 bulan		3 orang, 12 bulan						
						Gedung dekrasda berfungsi dg baik			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
						Sarpras Dekranasda (Meja, almari kayu, kursi lipat, kursi putar, rak pameran, AC, Gorden)			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket						
						Meningkatnya kapasitas pengrajin daerah			50 Pengrajin		50 Pengrajin		50 Pengrajin		50 Pengrajin		50 Pengrajin		50 Pengrajin						
					Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	Jumlah KUB yang dibina	72	78	318.470.000	82	124.370.999	88	707.641.191	96	1.830.813.091	106	3.166.293.229	120	5.037.154.562		120 KUB	11.184.743.072			
				1	Pelatihan dan Pembinaan Gula Kelapa Organik	Meningkatnya kapasitas produksi.			6KUB	250.000.000															
				2	Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa Organik	Jumlah KUB yang dilatih.			5 KUB	250.000.000	5 KUB	275.000.000	4 KUB	300.000.000	4 KUB	320.000.000	4 KUB	340.000.000	4 KUB	360.000.000	4 KUB	360.000.000			
				3	Pengembangan Industri Komoditas Agro (Durian, Susu Kambing, Biofarmaka, Ikan, Jagung, Padi)	Jumlah KUB yang dibina					3 komoditas	707.641.000	4 komoditas	1.830.813.000	5 komoditas	3.166.293.000	7 komoditas	5.037.154.000			3 komoditas	10.741.901.000			

Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
22	23

Lokasi Roadmap Agribisnis.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2017-2021										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2017		2018		2019		2020		2021						
								Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Menurunkan angka kemiskinan	Penurunan Tingkat kemiskinan	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun	14,83%	7,50%	498.209.445	16,50%	402.535.575	9,12%	946.108.307	7,10%	1.562.811.190	8,50%	2.158.283.352	8,50%	5.567.947.869			
					Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Sepeda Motor	Kompetensi kejuruan sepeda motor bagi pencari kerja meningkat	48 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Orang	-	Dinperinaker		
					Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing	Kompetensi kejuruan processing bagi pencari kerja meningkat	48 orang	-	-	-	-	-	16 orang	77.785.000	32 orang	190.000.000	32 orang	267.785.000	-	Dinperinaker		
					Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las Industri	Kompetensi Kejuruan Las Industri Meningkat	16 orang	16 Orang	49842000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 orang	49842000*	Dinperinaker	
					Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Technical Support	Kompetensi Kejuruan Technical Support Meningkat	32 orang	16 Orang	41557000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Orang	41557000*	Dinperinaker	
					Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	256 orang	-	32 orang	100540000*	32 orang	111080000*	64 orang	359.999.840	64 orang	375.000.000	192 orang	734.999.840	-	Dinperinaker		
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	Pelatihan ketrampilan kejuruan processing bagi pencari kerja meningkat	64 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	-	Dinperinaker	
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	-	32 orang	123.200.000	48 orang	195.828.000	80 orang	358.187.307	80 orang	388.918.000	80 orang	456.839.000	320 orang	1.522.972.307	-		
					Jasa persorangan administrasi pelatihan		-	2 orang	-	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang		
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing	Pelatihan ketrampilan kejuruan processing	-	48 orang	138000000*	48 orang	164628000*	16 orang	56336693*	-	-	-	-	-	112 orang	358964693*	-	
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	Pelatihan ketrampilan kejuruan menjahit bagi pencari kerja meningkat	64 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 orang	-	Dinperinaker	
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	-	16 orang	45.000.000	16 orang	51.750.000	48 orang	178.538.000	48 orang	205.318.000	64 orang	315.000.000	192 orang	795.606.000	-		
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit	-	16 orang	45000000*	32 orang	103500000*	-	-	-	-	-	-	-	48 orang	148500000*	-	
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	Pelatihan ketrampilan kejuruan sepeda motor bagi pencari kerja meningkat	48 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 orang	-	Dinperinaker	
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	-	16 orang	43.000.000	16 orang	48.200.000	64 orang	221.720.000	64 orang	254.978.000	64 orang	293.225.000	224 orang	861.123.000	-		
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor	-	32 orang	86000000*	48 orang	144600000*	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	230600000*	-	
					Pelatihan Keterampilan kejuruan Mebelair	Pelatihan ketrampilan kejuruan mebelair bagi pencari kerja meningkat	-	-	-	-	-	-	16 orang	60.000.000	32 orang	140.000.000	32 orang	200.000.000	-	Dinperinaker		
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	Pelatihan ketrampilan kejuruan batik bagi pencari kerja meningkat	32 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 orang	-	Dinperinaker	
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	-	16 orang	44.750.000	16 orang	51.462.500	32 orang	118.364.000	32 orang	136.118.000	16 orang	240.000.000	112 orang	590.694.500	-		
					Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	-	48 orang	134250000*	16 orang	51462500*	-	-	-	-	-	-	-	64 orang	185712500*	-	
					Monitoring pasca pelatihan	Laporan hasil monitoring	-	1 dokumen	19.662.445	1 dokumen	18.035.075	1 dokumen	26.450.000	1 dokumen	30.418.000	40.000.000	5 dokumen	134.565.520	-	Dinperinaker		
					Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT - LLK	Koordinasi lintas instansi	-	1 paket	337555*	1 paket	4964925*	-	-	-	-	-	2 paket	5302480*	-	Dinperinaker		
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Pelatihan	Kompetensi Instruktur UPT LLK Meningkat	-	10 Orang	21.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	21.500.000	Dinperinaker	
					Peralatan kejuruan processing	Peralatan kejuruan processing	6 macam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 macam	-	Dinperinaker	
					Laptop	Laptop	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	168.697.000		
					Printer Laser PSC	Printer Laser PSC	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					LCD Proyektor	LCD Proyektor	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Layar Proyektor	Layar Proyektor	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Kabel VGA 10M	Kabel VGA 10M	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	-		
					Sepeda Motor bebek 4 stroke FI	Sepeda Motor bebek 4 stroke FI	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Sepeda Motor sport 4 stroke FI	Sepeda Motor sport 4 stroke FI	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Multiscan Fuel Injection System for Yamaha	Multiscan Fuel Injection System for Yamaha	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Multiscan Fuel Injection System for Honda	Multiscan Fuel Injection System for Honda	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Engine Stand 4 silinder SK EFI	Engine Stand 4 silinder SK EFI	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					4 Gas Analyser HG 520	4 Gas Analyser HG 520	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Pneumatic Bike Lfr KW19-361	Pneumatic Bike Lfr KW19-361	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	-		
					Special Tools For Honda Motorcycle	Special Tools For Honda Motorcycle	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Special Tools For Yamaha Motorcycle	Special Tools For Yamaha Motorcycle	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Motorcycle	Motorcycle	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-		
					Jack stand 3 Ton KW05-60	Jack stand 3 Ton KW05-60	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	-		
					Pembinaan LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)	Kapasitas Kelembagaan Lembaga pelatihan kerja Swasta meningkat	34 LPKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 LPKS	-	Dinperinaker	

				Pembinaan Desa Produktif	Produktivitas masyarakat desa produktif meningkat	2 desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 desa	-	Dinperinaker		
				Replikasi Desa Produktif	desa produktif	2 desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 desa	-	Dinperinaker	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pemagangan Kerja	Pemahaman tentang informasi anagang meningkat	80 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 desa	-	Dinperinaker	
				Informasi Pemagangan Kerja	Informasi Pemagangan Kerja	80 Orang	32.400.000	80 orang	37.260.000	80 orang	42.849.000	80 orang	49.276.350	140 orang	108.219.352	140 orang	270.004.702	270.004.702	460 orang	-	Dinperinaker	
				Fasilitasi Pelatihan berbasis Kompetensi di UPT LK	Kompetensi Kejuruan Meningkatkan	1 paket	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	2400 orang	-	Dinperinaker		
					Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta aktif		100%		34.200.000	100%	39.330.000	100%	45.229.500	100%	52.013.925	100%	65.000.000		235.773.425			
				Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rekomendasi dan perijinan LPKS	34 LPKS	34.200.000	35 LPKS	39.330.000	36 LPKS	45.229.500	37 LPKS	52.013.925	38 LPKS	65.000.000	38 LPKS	235.773.425	38 LPKS	235.773.425	-	Dinperinaker	
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja		20,83%	25,40%	582.413.841	34,80%	493.077.393	40,60%	1.036.034.885	41,80%	1.518.061.698	43,20%	2.061.035.751	26,30%	5.690.623.568		Dinperinaker	
					Jumlah tenaga kerja yang ditangani (orang)		20,83%	25,40%	582.413.841	34,80%	493.077.393	40,60%	1.036.034.885	41,80%	1.518.061.698	43,20%	2.061.035.751	26,30%	5.690.623.568			
				Penyusunan dan Penempatan Tenaga Kerja	Informasi pasar kerja	12 dokumen	48.890.000	12 dokumen	53.800.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	66.000.000	12 dokumen	200.000.000	72 dokumen	428.690.000	72 dokumen	428.690.000	-	Dinperinaker	
				Jasa Perseorangan	1 orang	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-	-	-	
				Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja	70 orang	75 org	-	75 org	-	75 org	-	75 org	-	75 org	-	75 org	-	75 org	-	-	-	
				Job Fair	20 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Job Fair	Peluang Kesempatan Kerja	20 perusahaan	81.523.841	20 perusahaan	79.277.393	25 perh	116.000.000	25 perh	128.000.000	50 perh	300.000.000	140 perusahaan	704.801.234	140 perusahaan	704.801.234	-	Dinperinaker	
				Monitoring Penempatan tenaga kerja AKAD	Informasi tentang hasil penempatan AKAD	0 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Fasilitasi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Pengendalian Tenaga Kerja AKAD	1 lokasi	42.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	55.000.000	3 lokasi	239.061.698	3 lokasi	239.061.698	9 lokasi	625.123.396	9 lokasi	625.123.396	-	Dinperinaker	
				Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Revisi Tenaga Kerja Daerah	1 dokumen	75000000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Pihak Ketiga)	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	125.034.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Swakelola)	-	-	-	-	-	1 dokumen	74965115*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Fasilitasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan (Bursa Kerja Khusus, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Kerja Indonesia Swasta)	60 lembaga	30.000.000	60 lembaga	40.000.000	60 lembaga	45.000.000	60 lembaga	75.000.000	60 lembaga	75.000.000	60 lembaga	190.000.000	60 lembaga	190.000.000	-	Dinperinaker	
				Padat Karya Infrastruktur I	Penyerapan tenaga kerja sementara	66 orang	150.000.000	66 orang	160.000.000	66 orang	170.000.000	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	330 orang	850.000.000	330 orang	850.000.000	-	Dinperinaker	
				Padat Karya Infrastruktur II	Penyerapan tenaga kerja sementara	88 orang	150.000.000	66 orang	160000000*	66 orang	170.000.000	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	330 orang	690.000.000	330 orang	690.000.000	-	Dinperinaker	
				Padat Karya Infrastruktur III	Penyerapan tenaga kerja sementara	88 orang	150000000*	66 orang	160000000*	66 orang	170.000.000	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	330 orang	540.000.000	330 orang	540.000.000	-	Dinperinaker	
				Padat Karya Infrastruktur IV	Penyerapan tenaga kerja sementara	66 orang	150000000*	66 orang	160000000*	66 orang	170000000*	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	418 orang	520.000.000	418 orang	520.000.000	-	Dinperinaker	
				Padat Karya Infrastruktur V	Penyerapan tenaga kerja sementara	66 orang	150000000*	66 orang	160000000*	66 orang	170000000*	66 orang	180.000.000	66 orang	190.000.000	418 orang	520.000.000	418 orang	520.000.000	-	Dinperinaker	
				Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) I	Perluasan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	20 orang	55.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	80.000.000	140 orang	330.000.000	140 orang	330.000.000	-	Dinperinaker	
				Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) II	Perluasan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	20 orang	55.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	80.000.000	100 orang	330.000.000	100 orang	330.000.000	-	Dinperinaker	
					Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja			252.591.985	281.250.621	672.202.605	1.083.421.885	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
					Persentase sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja		0,00%	29,97%	252.591.985	32,13%	281.250.621	32,66%	672.202.605	33,75%	1.083.421.885	34,84%	#REF!	34,84%	#REF!	#REF!	#REF!	
					Persentase perlindungan dan kesejahteraan pekerja			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
					Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan			48,26%	56,15%	63,44%	71,25%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	79,06%	
				Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) , Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Pemahaman tentang PP / PKB meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) , Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Struktur skala Upah	Sosialisasi pembuatan PP, PKB dan struktur skala upah	75 perusahaan	-	50 Perusahaan	20.000.000	100 Perusahaan	60.000.000	100 Perusahaan	80.000.000	100 perusahaan	85.000.000	425 perusahaan	245.000.000	425 perusahaan	245.000.000	-	Dinperinaker	
				Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) , Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Struktur skala Upah	Sosialisasi pembuatan PP, PKB dan struktur skala upah	-	-	50 Perusahaan	20000000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Fasilitasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purworejo	Melaksanakan Fasilitas Lembaga kerjasama Tripartit kabupaten Purworejo	3 dokumen	100%	87.951.985	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	158.000.000	100%	160.000.000	100%	585.951.985	100%	585.951.985	-	Dinperinaker
				Porseni / Sarasehan / Workshop Tripartit	-	100%	68659015*	100%	97933000*	100%	18000000*	100%	-	100%	-	100%	184592015*	100%	184592015*	-	Dinperinaker	
				Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja	Hubungan industrial meningkat	50 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja	Melaksanakan bimbingan teknis Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja	50 perusahaan	50.280.000	60 perusahaan	55.000.000	60 Perusahaan	60.000.000	60 Perusahaan	65.000.000	60 Perusahaan	70.000.000	290 perusahaan	300.280.000	290 perusahaan	300.280.000	-	Dinperinaker	
				Fasilitasi Dewan Pengupahan	Rekomendasi UMK 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Rekomendasi hasil monitoring penerapan UMK 2016	60 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Menyusun rekomendasi usulan UMK	-	100%	45.360.000	100%	45.360.000	100%	54.432.000	100%	65.318.400	100%	78.667.038	100%	289.137.438	100%	289.137.438	-	Dinperinaker
					Hasil monitoring dan pembinaan sistem pengupahan di perusahaan	8 kali	100%	45360000*	100%	9072000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Sosialisasi UMK	Pemahaman pelaku dunia usaha tentang UMK 2017 meningkat	100 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

					Memberikan pemahaman kepada pelaku dunia usaha tentang UMK	-	100%	19200000*	100%	23600000*	100%	28.320.000	100%	33.984.000	100%	45.000.000	100%	107.304.000			
					Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur Skala Upah	Bmtek Penyusunan PP, PKB dan Struktur Skala Upah	-	50 orang	45.000.000	100 orang	90000000*	100 orang	100.000.000	100 orang	110.000.000	100 orang	125.000.000	450 orang	380.000.000	Dinperinaker	
					Penyuluhan Pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit	Terbentuknya LKS Bipartit baru . Pemberdayanya LKS Bipartit yang sudah ada	30 perusahaan	-	-30 perusahaan	18.000.000	30 perusahaan	21.600.000	30 perusahaan	25.920.000	30 perusahaan	36.104.000	150 orang	101.624.000	Dinperinaker		
					Pembinaan Hubungan Industrial dan syarat kerja bagi peserta didik SMK	Melaksanakan sosialisasi hubungan industrial dan persyaratan kerja bagi peserta didik SMK	-	-	-1.000 anak	68000000*	1.000 anak	81.600.000	1.000 anak	97.920.000	1.000 anak	117.504.000	4.000 anak	297.024.000	Dinperinaker		
					Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja	Melaksanakan Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja bagi Pekerja	-	-	-100 orang	34000000*	100 orang	40800000*	100 orang	48.960.000	100 orang	58.752.000	400 orang	107.712.000	Dinperinaker		
					Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	Meningkatkan Peran dan Fungsi Serikat Pekerja	-	-	-50 orang	25.000.000	100 orang	60.000.000	150 orang	129.356.991	100 orang	130.000.000	400 orang	344.356.991	Dinperinaker		
						Meningkatkan Peran dan Fungsi Serikat Pekerja	-	-	50 orang	25000000*	-	-	-	-	-	-	50 orang	25000000*	Dinperinaker		
					Fasilitasi Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Layanan Penyelesaian kasus HI	-	100%	14.000.000	100%	16.800.000	100,00%	20.160.000	100,00%	24.192.000	100,00%	25.144.000	100%	100.296.000	Dinperinaker	
					Pembinaan Fasilitas Pekerja	Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan pekerja di Perusahaan	-	25 Perusahaan	10.000.000	25 perusahaan	11.090.621	50 Perusahaan	13.308.745	50 Perusahaan	15.970.494	50 Perusahaan	29.164.593	200 perusahaan	79.634.454	Dinperinaker	
						Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan pekerja di Perusahaan	-	-	-25 perusahaan	8909379*	-	-	-	-	-	-	25 perusahaan	8909379*	Dinperinaker		
					Pembinaan program Jamsostek di perusahaan	Pembinaan kepada perusahaan tentang program Jamsostek	-	-	-50 Perusahaan	20000000*	50 Perusahaan	24000000*	50 Perusahaan	28.800.000	50 Perusahaan	34.560.000	200 perusahaan	63.360.000	Dinperinaker		
					Penyuluhan Pencegahan/penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pemutusan hubungan kerja	Pemahaman Pekerja dan penguasaan tentang penyelesaian PHI dan PHK mningkat	40 perusahaan	-	-100 Perusahaan	64000000*	80 Perusahaan	82.781.860	200 Perusahaan	200.000.000	100 Perusahaan	#REF!	530 perusahaan	512.781.860	Dinperinaker		
						Pemahaman Pekerja dan penguasaan tentang penyelesaian PHI dan PHK mningkat	-	-	-	-	20 Perusahaan	19656540*	-	-	-	-	20 perusahaan	19656540*	Dinperinaker		
					Fasilitas Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan Pengawasan	-	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	75000000*	100%	375000000*	Dinperinaker	
					Pemeriksaan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	Layanan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja	25 kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	Dinperinaker		
					Pengujian Peralatan K3	Fasilitasi Pengujian K3	60 obyek / alat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 alat K3	-	Dinperinaker		
					Sosialisasi Pekerja Anak	Pemahaman masyarakat tentang pekerja anak meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	-	Dinperinaker		
					Pemeriksaan penerapan Norma Ketenagakerjaan	Rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan Norma ketenagakerjaan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 perusahaan	-	Dinperinaker		
					Operasional Tim satgas TKI	Pemahaman tentang hak dan kewajiban TKI bagi masyarakat meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 orang	-	Dinperinaker		
					Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase Layanan Transmigrasi	-	100%	176.192.248	100%	163.805.831	100%	350.763.256	100%	527.715.538	100%	692.608.752	100%	1.911.085.625	Dinperinaker	
					Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Layanan transmigrasi I	-	100%	176.192.248	100%	163.805.831	100%	350.763.256	100%	527.715.538	100%	692.608.752	100%	1.911.085.625	Dinperinaker	
						Layanan transmigrasi II	-	100%	163807752*	-	211194168*	-	-	-	-	-	100%	375.001.920	Dinperinaker		
Meningkatnya jumlah industri	Pertumbuhan industri				Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.	prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolannya	0	9,70%	699.586.869	11,29%	700.215.327	12,87%	1.270.447.402	14,47%	1.741.461.276	16,06%	587.668.032	16%	6.200.013.666	Dinperinaker	
					Pelatihan Produk Batik Khas Purworejo	Meningkatnya ketrampilan tentang teknik penarsaan	4 KUB	-	250.000.000	3 KUB	230.215.000	2 KUB	175.000.000	1 KUB	-	1 KUB	157.668.000	14 KUB	812.883.000	Dinperinaker	
					Pelatihan pengembangan produk industri kecil di pedesaan.	Meningkatnya kapasitas produksi.	5 KUB	-	250.000.000	5 KUB	-	5 KUB	-	5 KUB	275.000.000	-	5 KUB	525.000.000	Dinperinaker		
					Monitoring jnin Usaha Industri	Tersedianya data hasil monitoring jnin usaha industri	-	-	-	0%	-	16 Kec.	70.000.000	0%	-	-	-	16 Kec.	120.000.000	Dinperinaker	
					Pengembangan Produk Batik Khas Purworejo	Meningkatnya kapasitas produksi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinperinaker		
					Pelatihan Industri Kecil Makanan	Meningkatnya kapasitas produksi.	5 KUB	-	250.000.000	5 UB	300.000.000	5 KUB	250.000.000	5 KUB	360.000.000	-	5 KUB	1.360.000.000	Dinperinaker		
					Pelatihan Industri Kecil Olahan Jamur	Meningkatnya kapasitas produksi.	-	-	-	-	1 KUB	-	1 KUB	-	-	-	-	4 KUB	80.634.760	Dinperinaker	
					Pembinaan dan fasilitasi Alat Produksi Minyak Atsiri	Meningkatnya kapasitas produksi.	1 KUB	-	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 KUB	355.000.000	Dinperinaker		
					Pelatihan Pengembangan Bagi Kelomok Industri Kecil	Meningkatnya kapasitas produksi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinperinaker		
					Bimbingan Penerapan SINas bagi pemegang IUI	Meningkatnya standard produk	-	-	-	-	30 perusahaan	-	-	-	-	-	30 perusahaan	-	Dinperinaker		
					Penyusunan Database industri	Tersedianya data industri.	1 dokumen	-	70.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	65.447.000	1 dokumen	-	-	1 dokumen	235.447.000	Dinperinaker		
					Pengembangan industri pengolahan komoditas produk unggulan purworejo	-	-	-	3 komoditas	-	-	300.000.000	5 komoditas	500.000.000	-	-	3 komoditas	800.000.000	Dinperinaker		
					Pelatihan Kelompok Industri Kecil.	Jumlah KUB yang dilatih.	6 KUB	-	300.000.000	6 KUB	-	6 KUB	330.000.000	6 KUB	500.000.000	6 KUB	-	6 KUB	1.130.000.000	Dinperinaker	
					Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional bagi Industri Kecil/Menengah (IKM)	Jumlah IKM yang diberi Sosialisasi .	30 IKM	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30 IKM	50.000.000	Dinperinaker		
					Pengawasan dan Pendataan Industri	Data dan informasi tentang kondisi perusahaan industri kecil menengah	16 Kecamatan	-	60.000.000	16 Kecamatan	70.000.000	16 Kecamatan	80.000.000	16 Kecamatan	106.461.000	16 Kecamatan	100.000.000	16 Kec.	416.461.000	Dinperinaker	
					Penyusunan Raperda tentang RPIK(Rencana Pengembangan Industri Kabupaten)	Naskah Akademik, KLHS dan Raperda RPIK .	3 jenis dokumen	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	100.000.000	Dinperinaker		

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Komputer	29 PC 5 laptop	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	48.790.000	35 PC, 5 laptop	53.669.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	64.790.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	72.790.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	80.790.000	38 PC, 10 Laptop, 22 Printer	320.829.000	Dinperinaker
			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	11 AC, 1 PABX (20 line)	11.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	12.118.370	11 AC, 1 PABX (20 line)	15.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	17.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	19.016.700	11 AC, 1 PABX (20 line)	74.185.170	Dinperinaker
			Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur UPT LK	Pemeliharaan sarana dan Prasarana UPT LK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	Dinperinaker
				Kendaraan roda 4	-	3 unit	26.098.000	3 unit	31.317.600	3 unit	37.581.120	3 unit	45.097.344	3 unit	54.116.813	3 unit	194.210.877	Dinperinaker
				Kendaraan roda 2	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	
				AC	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	
				Mesin pemotong Rumput	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	
				Komputer	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	
				Mesin jahit manual	-	18 unit	-	18 unit	-	18 unit	-	18 unit	-	18 unit	-	18 unit	-	
				Mesin jahit high speed	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	
				Mesin jahit multifungsi	-	20 unit	-	20 unit	-	20 unit	-	20 unit	-	20 unit	-	20 unit	-	
				Mesin obras	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur UPT Tat Twam Asi	Pemeliharaan sarana dan Prasarana UPT TTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9.598.000	
				Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Printer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Mesin Ketik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Mesin potong rumput	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rehabilitasi Pagar UPT LK	Rehabilitasi Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 m2	-	Dinperinaker
			Rehabilitasi Ruang Instruktur & Ruang Kelas, serta Pemasangan Plafon 3 Workshop & Ruang Parkir	Rehabilitasi Ruang Instruktur & Ruang Kelas, serta Pemasangan Plafon 3 Workshop & Ruang Parkir	-	1.750 m2	481.671.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750 m2	481.671.500	Dinperinaker
			Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda	Kendaraan roda empat (mobil)	-	-	-	1 unit	625.000.000	-	156.000.000	-	162.000.000	-	172.000.000	1 unit	1.115.000.000	Dinperinaker
				Kendaraan roda dua (motor)	-	-	-	5 unit	-	6 unit	-	6 unit	-	6 unit	-	23 unit	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	100%	12.000.000	100%	14.400.000	100%	17.280.000	100%	20.736.000	100%	24.883.200	100%	89.299.200	Dinperinaker
			Penilaian Angka Kredit	Layanan administrasi angka kredit instruktur	-	100%	12.000.000	100%	14.400.000	100%	17.280.000	100%	20.736.000	100%	24.883.200	100%	89.299.200	Dinperinaker
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem capaian kinerja dan keuangan	-	100%	65.600.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	445.600.000	Dinperinaker
			Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	70 dokumen	18 dokumen	25.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	45.000.000	112 dokumen	175.000.000	Dinperinaker
			Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Hasil Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	Dinperinaker
				RKA, RKA-P, DPA, DPPA, RKT, RKT-P, RENJA, RENJA-P, PK, PK-P, LKPI, LKPI-P, RKO, SPIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan,	-	16 dokumen	40.600.000	16 dokumen	50.000.000	16 dokumen	55.000.000	16 dokumen	60.000.000	16 dokumen	65.000.000	80 dokumen	270.600.000	
				Jasa perorangan administrasi perencanaan	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan	-	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	175.000.000	Dinperinaker
			Penyusunan database SKPD / PD	Database SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	Dinperinaker
				Database Perindustrian, Tenaga kerja dan Transmigrasi	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	175.000.000	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo 2016-2021 merupakan rangkuman yang telah disajikan pada BAB V.

Beberapa tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo 2016-2021 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinperinaker adalah :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
1.	Menurunkan angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
			Meningkatnya jumlah industri	Pertumbuhan industri

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Menurunkan angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,1 %	4,60 %	3,90 %	3,40 %	2,90 %	2,90 %
			Meningkatnya jumlah industri	Pertumbuhan industri	0,39 %	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	3.5%

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2021 ini disusun seoptimal mungkin sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Segenap sumberdaya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.

Memulai pembangunan melalui sebuah perencanaan yang baik menjadi itikad baik pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan secara terencana. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah di purworejo, baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat untuk mencapai hasil-hasil yang bermanfaat bagi semua pihak.

Keberhasilan dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki/melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada periode berikutnya.

Purworejo, 4 Desember 2017

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PURWOREJO**

Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
19630906 198603 1 018

LAMPIRAN I

DEVINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA RPJMD KABUPATEN PURWOREJO 2017-2021

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Devinisi Operasional Indikator		Baseline 2016	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran :				
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	Indikator sasaran :				
	Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Peningkatan daya saing tenaga kerja mencakup 2 unsur, yaitu pencari kerja dan pekerja	Angka TPT	4,01%	Angka BPS
2	Sasaran :				
	Meningkatnya jumlah industri				
	Indikator sasaran :				
	Pertumbuhan industri		= (jumlah industry tahun n- jumlah industry tahun n-1) dibagi jumlah industry tahun n-1 dikalikan 100%	0,10%	Y = (18890- 18872 / 18872)100% Y = 0,10 %

LAMPIRAN II

DEVINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM PADA RPJMD KABUPATEN PURWOREJO 2016-2021

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Devinisi Operasional Indikator		Baseline 2015	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
1	2	3	4	5	6
1.	Program :				
	Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja				
	Indikator program :				
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinperinaker dan Lembaga Pelatihan kerja Swasta pertahun terhadap pencari kerja tahun 1 tahun	Jumlah pencari kerja yang mendapat peningkatan kualitas dan produktivitas terhadap jumlah pencari kerja 1 tahun	14,83%	Jumlah pencari kerja tahun 2015 sebanyak 9.600 orang Jumlah pencari (th 2015) yang mendapat pelatihan dihitung dengan : Pelatihan UPT LLK (400 siswa) + Pelatihan berbasis masyarakat (224 siswa) + Pelatihan Lembaga swasta (800 siswa) = 1.424 siswa $Y=1.424/9.600$ $Y=14,83\%$
	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta aktif	Jumlah LPKS yang di bina terhadap LPKS yang ada	Jumlah LPKS yang di bina terhadap LPKS yang ada	100%	Jumlah LPKS dibina 34 LPKS Jumlah LPKS 34 LPKS $Y= (34/34) \times 100\%$ $Y= 100\%$
2.	Program :				
	Peningkatan kesempatan kerja				
	Indikator program :				
	Persentase tenaga kerja yang di tangani tiap tahun	Persentase pencari kerja yang ditangani melalui penempatan tenaga kerja atau ditangani melalui perluasan kerja terhadap pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan terhadap jumlah pencari kerja	20,83 %	Jumlah pencari kerja tahun 2015 sebanyak 9.600 orang Penempatan Kerja : Jumlah AKL = 741 Jumlah AKAD = 527 Jumlah AKAN =732

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Devinsi Operasional Indikator		Baseline 2015	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
					Jumlah Perluasan Kerja= 0 Total : 2000 $Y=2.000/9.600 \times 100\%$ Y=20,83%
3.	Program :				
	Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja				
	Indikator program :				
	Persentase sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja	Jumlah perusahaan yang suda mempunyai sarana HI dan Syarat Kerja terhadap jumlah perusahaan	Jumlah perusahaan yang sudah mempunyai sarana HI dan Syarat Kerja terhadap jumlah perusahaan	\$\$	\$\$
	Persentase perlindungan dan kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus yang ditangani terhadap jumlah kasus yang dilaporkan	Jumlah kasus yang ditangani terhadap jumlah kasus yang dilaporkan	\$\$	\$\$
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	Jumlah yang mendapatkan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan terhadap jumlah perusahaan	Jumlah yang mendapatkan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan terhadap jumlah perusahaan	\$\$	\$\$
4.	Program :				
	Penyelenggaraan Transmigrasi				
	Indikator program :				
	Persentase Layanan Transmigrasi	Jumlah unsur layanan	Jumlah unsur layanan penyelenggaraan	0%	

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Devinisi Operasional Indikator		Baseline 2015	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
		penyelenggaraan transmigrasi yang terpenuhi terhadap jumlah layanan penyelenggaraan transmigrasi yang harus terpenuhi	transmigrasi yang terpenuhi terhadap jumlah layanan penyelenggaraan transmigrasi yang harus terpenuhi		Unsur penyelenggaraan : 1. Penyebarluasan Informasi 2. Seleksi, Pembekalan dan Pemantapan 3. Penjajagan lokasi 4. Peninjauan lokasi 5. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) 6. Monitoring KSAD 7. Pengawasan $\% = \frac{\Sigma \text{ unsur layanan penyelenggaraan transmigrasi yang terpenuhi}}{\Sigma \text{ unsur layanan penyelenggaraan transmigrasi yang harus terpenuhi}} \times 100\%$ $Y = \frac{7}{7} \times 100\%$ $Y = 100\%$
5.	Program :				
	Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah				
	Indikator program :				
	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaannya	Jumlah IKM yang di bina terhadap jumlah IKM	Jumlah IKM yang di bina terhadap jumlah IKM	\$\$	
6.	Program :				
	Agribisnis Komoditas Unggulan di Sektor Hilir				
	Indikator program :				
	Persentase KUB komoditas unggulan yang di bina	Jumlah KUB komoditas Unggulan yang dibina terhadap jumlah KUB	Jumlah KUB komoditas Unggulan yang dibina terhadap jumlah KUB komoditas unggulan	\$\$	

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Devinisi Operasional Indikator		Baseline 2015	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
		komoditas unggulan			
7.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Indikator program :				
	Cakupan Layanan administrasi perkantoran (Y)	Layanan administrasi perkantoran yang ditangani	$Y = \frac{\text{Layanan administrasi perkantoran yang ditangani}}{\text{Layanan administrasi perkantoran yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$	100%	Jumlah kegiatan pada layanan administrasi ada 11 dan semua kegiatan dilaksanakan $Y = 11/11 \times 100\% = 100\%$
8.	Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
	Indikator program :				
	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik (Y)	Sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	$Y = \frac{\text{Sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik}}{\text{Sarana prasarana aparatur yang seharusnya berfungsi dengan baik}} \times 100\%$	100%	Jumlah sarpras utama/vital tahun 2015 sebanyak 6 jenis dan berfungsi baik : - Kendaraan roda empat 5 bh - Kendaraan roda dua 15 bh - Gedung 45 unit - komputer 18 bh - Laptop/note book 29 bh - printer 60 bh $Y = 6/6 \times 100\% = 100\%$
9.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur				
	Indikator program :				
	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (Y)	Kapasitas sumberdaya aparatur	$Y = \frac{\text{Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya}}{\text{Aparatur yang seharusnya ditingkatkan kapasitasnya}} \times 100\%$	-	

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Definisi Operasional Indikator		Baseline 2015	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
10.	Program :				
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Indikator program :				
	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan (Y)	Capaian subsistem pembentuk system capaian kinerja dan keuangan (perencanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan/pertanggungjawaban)	$Y = \frac{\text{Dokumen hasil kerja subsistem yang ada}}{\text{Dokumen hasil kerja subsistem yang seharusnya ada}} \times 100\%$	100%	1 Renstra 2016-2021 2 Renja 20 3 Renja-P 4 RKA 5 RKA-P 6 DPA 7 DPPA 8 RKT 9 RKT-P 10 PK 11 PK-P 12 RKO 13 Nominatif pegawai 14 KIP/Insentaris 15 Realisasi fisik& Keu 16 Lap capaian renja 17 SPIP 18 LKPJ 19 LKJiP 20 Lap Pajak 21 Lap Bulanan/Fungsional 22 Lap Triwulan/BA Periksa kas 23 Lap Semester/LRA 14 Lap Thn/LRA, Neraca, LO, Calk, Perub eksisting 15 Lap pajak $Y = 15/15 \times 100\% = 100\%$
11.	Program				
	Penyusunan Data Dasar				

No	Sasaran / Indikator / program / Outcome	Devinisi Operasional Indikator		Baseline 2015	
		Uraian	Formula	Besaran	Penghitungan
	Pembangunan				
	Indikator program :				
	Persentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan	Ketersediaan data dasar pembangunan di dalam lingkup tugas perangkat daerah masing-masing	$Y = \frac{\text{Jumlah elemen data yang tersedia}}{\text{Jumlah elemen data yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	100%	Y = database yang sudah disusun 12 bulan Y = 12/12x 100% Y= 100%

LAMPIRAN IV

Visi Bupati Purworejo :

Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan

Misi Bupati Purworejo :

- I. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis
- II. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan
- III. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal
- IV. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga
- V. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan
- VI. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik
- VII. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. KyaiBregkel No. 13/15 PurworejoKode Pos 54112

Telp. (0275) 321070 Fax. (0275) 325451

E- mail: dinperinaker@purworejokab.go.id Website: dinperinaker.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 050.12/694/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 – 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Merumuskan Rancangan Renstra
 2. Menyajikan Rancangan Renstra
 3. Menyusun Rancangan Akhir Renstra
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 6 April 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO,

Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
19630906 198603 1 018

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR:050.12/694/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN TENAGAKERJA KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2017 – 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS DINAS PEINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 – 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Sutrisno, M.Si 19630906 198603 1 018	Kepala Dinas	Penanggung Jawab merangkap Ketua
2.	Pracoyo, S.Sos 19611008 198403 1 101	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Drs. Aris Widyantoro,MM 19600708 199203 1 005	Kepala Bidang Pentatrans	Anggota
4.	Ir. Subagiyo, M.Si 19600514 198903 1 009	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
5.	Lilik Setiawan,SE 19700109 199803 1 004	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Bambang Darmuko, S.Sos. MT 19620929 198110 1 001	Kepala UPT LLK	Anggota
6.	A. Roni Krisnanto, A.Md 19830206 201001 1 0019	Pelaksana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Faizah Isnaeni, S.Pd --	Pelaksana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Purworejo
 pada tanggal : 6 April 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
 KERJA KABUPATEN PURWOREJO,

Drs. SUTRINO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 19630906 198603 1 018